



**PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Oleh

Rido Agung Gigih Krisherdian

NIM 100810301039

Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi

Universitas Jember

2015



**PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

Rido Agung Gigih Krisherdian

NIM 100810301039

Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi

Universitas Jember

2015

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : Rido Agung Gigih Krisherdian

NIM : 100810301039

Program Studi : S1 Akuntansi

Judul Skripsi : **Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas
Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah
Kabupaten Jember**

Menyatakan bahwa skripsi yang telah saya buat merupakan hasil karya sendiri. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan dan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini, Saya buat dengan sebenarnya.

Jember, 4 Februari 2015

Yang menyatakan,

Rido Agung Gigih Krisherdian
NIM 100810301039

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul skripsi : **Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Jember**
Nama Mahasiswa : Rido Agung Gigih Krisherdian
NIM : 100810301039
Program Studi : S-1 Akuntansi
Tanggal Persetujuan : 13 April 2015

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Muhammad Miqdad, SE., MM., Ak.
NIP 19710727 199512 1 001

Andriana, SE., M.Sc., Ak.
NIP 19820929 201012 2 001

Ketua Program Studi
S1 Akuntansi

Dr. Muhammad Miqdad, SE., MM., Ak.
NIP 19710727 199512 1 001

PENGESAHAN

Judul Skripsi

**PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN
DAERAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh ;

Nama : Rido Agung Gigih Krisherdian

NIM : 10810301039

Program Studi : Akuntansi (S1)

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal :

22 Juni 2015

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Tim Penguji

1. Ketua : Drs. H. Djoko Supatmoko, MM., Ak. (.....)
NIP 19550227 198403 1 001
2. Sekretaris : Dr. Hj. Siti Maria W. M.Si., Ak. (.....)
NIP 19660805 199201 2 001
3. Anggota : Septarina Prita DS. SE., M.SA., Ak. (.....)
NIP 19820912 200604 2 002

Mengetahui/ Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi
Dekan,

Dr. Moehammad Fathorrazi., M.Si.
NIP. 19630614 199002 1 001

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada ;

1. Eyang Uti tercinta Hj. Henti Supriyah, kedua orang tua tercinta, Ayahanda Hery Suprono Sukristiono, SH. dan Ibunda Her Susilowati, terimakasih atas segala dukungan moril maupun materiil dan terima kasih atas segala dukungan dan dedikasinya sampai saat ini.
2. Guru-guru sejak taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran.
3. Almamater Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

MOTTO

“Orang-orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja karena mereka terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka bekerja. Mereka tidak menyia-nyiakan waktu untuk menunggu inspirasi”

(Ernest Newman)

“Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik”

(Evelyn Underhill)

“Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya; hidup di tepi jalan dan dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah”

(Abu Bakar Sibli)

SKRIPSI

**PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN
DAERAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**

Oleh

Rido Agung Gigih Krisherdian

NIM 100810301039

Pembimbing

Dosen Pembimbing I : Dr. Muhammad Miqdad, SE., MM., Ak.

Dosen Pembimbing II : Andriana, SE., M.Sc., Ak.

Rido Agung Gigih Krisherdian

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh persepsi transparansi dan akuntabilitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten Jember. Penilaian persepsi didasarkan pada indikator-indikator yang mencerminkan kondisi yang transparan dan akuntabel. Sampel penelitian diambil dari keseluruhan populasi dengan pertimbangan jumlah populasi yang relatif sedikit (kurang dari 100) maka seluruh elemen populasi dapat diambil secara keseluruhan. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui hasil rekapitulasi dari jawaban kuesioner yang telah diberikan kepada responden. Alur analisis dimulai dari Uji kualitas data dan berlanjut ke uji asumsi klasik dan terakhir pada uji hipotesis. Hasil pengujian hipotesis dari penelitian ini menunjukkan bahwa baik transparansi maupun akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Kata kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Kinerja Pemerintah Daerah.

Rido Agung Gigih Krisherdian

Accounting Majors, Faculty of Economics, Jember University

ABSTRACT

This study aimed to examine the effect of members of local legislative perception about local financial transparency and accountability toward local government performance. Perception assessment base on indicators that reflect transparent and accountable condition. Sample were taken from the overall population with consideration of the pupolation is relatively small (less than 100) then all elements can be taken as a whole population. This study uses primary data obtained the recapitulation of the questionnaire that has been given to the respondent. Analysis flow starts from quality data test and continues to classical assumption test and for the last is a hypothesis testing. The result of testing hypothesis of this study showed that both transparency and accountability affect the performance of local government performance.

Keywords: *Transparency, Accountability, Government performance*

RINGKASAN

Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Jember; Rido Agung Gigih Krisherdian, 100810301039; 2015; 56 Halaman; Jurusan Akuntansi, Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember.

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Jember”. Penelitian ini adalah bertujuan untuk menganalisis pengaruh persepsi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember tentang transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Jember.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota dari komisi A, B, C dan D yang menduduki posisi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Jember. Sampel yang digunakan adalah semua populasi, ini disebabkan elemen populasi yang terlalu heterogen dan relatif sedikit (kurang dari 100). Karena penghitungan sampel dengan jumlah populasi yang kurang dari 100 akan menghasilkan jumlah sampel yang sangat sedikit. Hal ini akan membuat hasil penelitian jadi kurang akurat dan kurang merepresentatifkan opini dari keseluruhan populasi.

Variabel digunakan yaitu sebanyak 3 variabel yakni Transparansi dan akuntabilitas sebagai variabel independen, sedangkan kinerja pemerintah daerah sebagai variabel dependennya. Dalam pengukuran tiap-tiap variabel menggunakan indikator yang bersumber baik dari berbagai tinjauan pustaka maupun penelitian terdahulu yang sejenis. Alat analisis yang digunakan adalah Analisis Jalur, yang dimulai dari uji kualitas data, uji asumsi klasik hingga pengujian hipotesis yang akhirnya didapatkan hasil dari data yang didapat dan direkapitulasi sebelumnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) transparansi laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten Jember dengan arah positif; 2) akuntabilitas keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten Jember dengan arah positif.

PRAKATA

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmatNya, karena tanpaNya tidak ada suatu hajatpun yang dapat terlaksana. Skripsi yang penulis ajukan merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang amat besar kepada ;

1. Bapak Dr. Moehammad Fathorrazi, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
2. Bapak Dr. Alwan Sri Kustono, SE., M.Si., Ak. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember
3. Bapak Dr. Achmad Roziq, SE., M.Si., Ak. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember
4. Bapak Dr. Muhammad Miqdad, SE., MM., Ak. selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember. Juga selaku Dosen Pembimbing I.
5. Ibu Andriana, SE., M.Sc., Ak. selaku Dosen Pembimbing II sabar memberikan segenap waktu dan pemikiran, bimbingan, semangat, juga nasehat yang sangat bermanfaat sehingga terselesaikan skripsi ini.
6. Ibu Nining Ika Wahyuni, SE., M.Sc., Ak. Selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Susunan tim penguji, Bapak Drs. H. Djoko Supatmoko, MM., Ak., Ibu Dr. Hj. Siti Maria W. M.Si., Ak., dan Ibu Septarina Prita DS. SE., M.SA., Ak. Terima kasih telah memberi semangat, dukungan dan bimbingan selama pelaksanaan ujian skripsi dan pendadaran.
8. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi Universitas Jember yang telah membimbing sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi.
9. Teristimewa Ayah dan Ibu serta Kakak dan Adikku tersayang. Terima kasih teramat atas moril dan materiil, juga semangat, do'a, nasehat, kasih sayang, dan juga perhatiannya.

10. Andriani Mutiara Sari, SE. yang selalu memberikan semangat dan motivasi di setiap harinya selama kuliah
11. Teman-teman klub futsal akuntansi 2010, terima kasih atas semangat, canda, tawa dan kebersamaannya di dalam maupun di luar lapangan
12. Teman seperjuangan Brian Ahmad, Abdul Muchid, dan seluruh rekan Akuntansi 2010 F.E. – UNEJ, terimakasih untuk doa dan bantuannya.
13. Kelompok Kuliah Kerja Nyata 57 desa Sumberjati kecamatan Silo yang senantiasa memberi dukungan dan doa.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik karena keterbatasan ilmu yang dimiliki maupun kesalahan dari pihak pribadi. Demikian, semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi almamater tercinta, serta bagi setiap pembaca pada umumnya.

Jember, 4 Februari 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PEMBIMBING	viii
ABSTRAK	ix
RINGKASAN	xi
PRAKATA	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Landasan Teori	6

2.1.1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	6
2.1.2 Fungsi DPRD	7
2.1.3 Hak-hak Yang Dimiliki DPRD	8
2.1.4 Hak-Hak Personal Yang Dimiliki Anggota DPRD	8
2.1.5 Kewajiban Anggota DPRD	9
2.1.6 Transparansi dan Akuntabilitas.....	10
2.1.7 Keuangan Daerah.....	12
2.1.8 Kinerja dan Penilaian Kinerja.....	17
2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu	18
2.3 Kerangka Konsep Penelitian	21
2.4 Pengembangan Hipotesis	23
2.4.1 Transparansi Keuangan Daerah dan Kinerja Pemerintah Daerah	23
2.4.2 Akuntabilitas Keuangan Daerah dan Kinerja Pemerintah Daerah.....	24
BAB 3. METODE PENELITIAN	26
3.1 Jenis Penelitian	26
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	26
3.3 Populasi dan Sampel Penelitian	26
3.4 Jenis dan Sumber Data	27
3.5 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	27
3.5.1 Transparansi.....	27
3.5.2 Akuntabilitas.....	28
3.5.3 Kinerja	28
3.6 Teknik dan Alat Perolehan Data.....	29
3.7 Metode Analisis Data	30

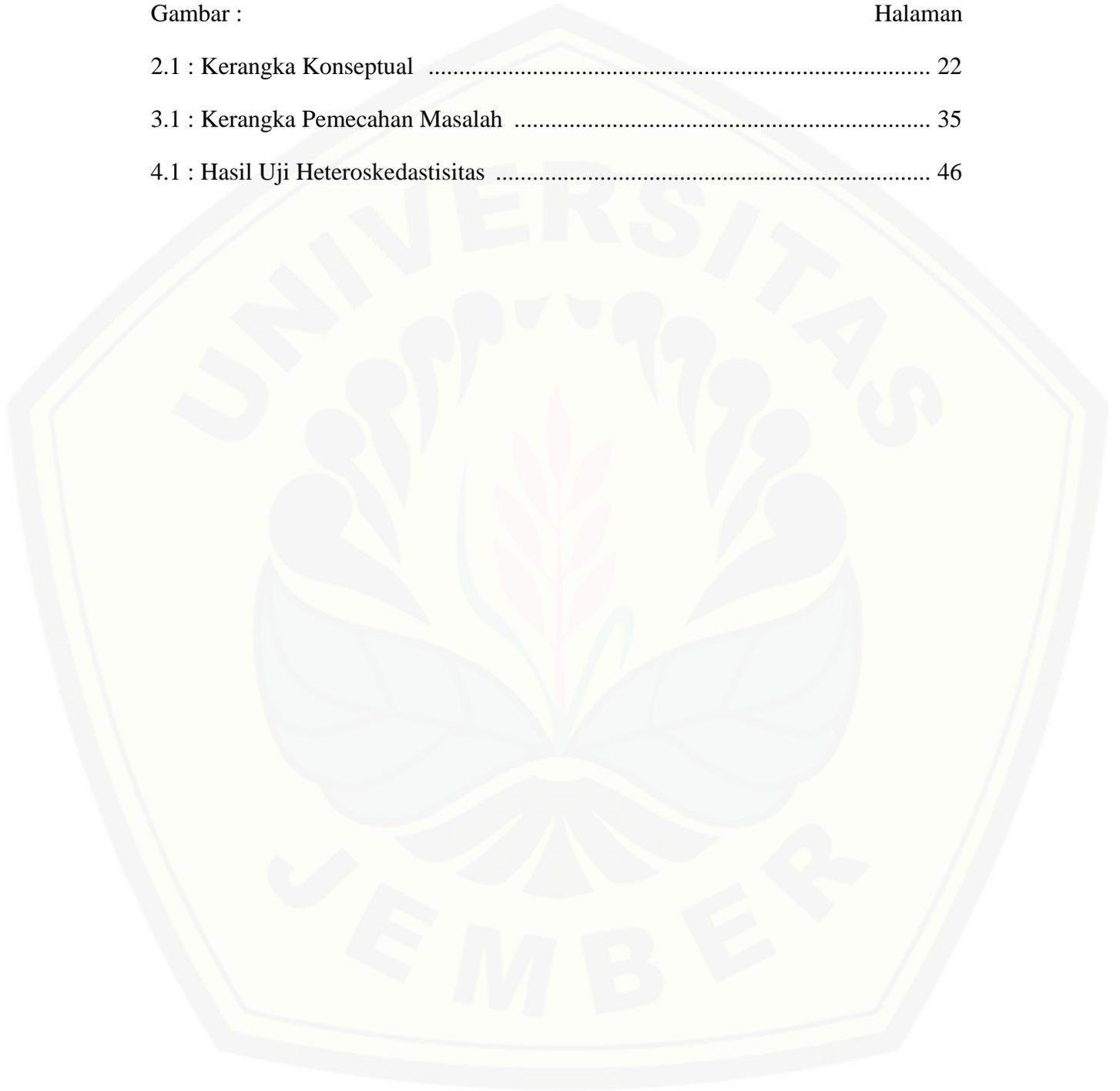
3.7.1 Uji Kualitas Data	30
3.7.2 Uji Asumsi Klasik	31
3.7.3 Analisis Regresi Linear Berganda	32
3.7.4 Uji Hipotesis	33
3.7 Kerangka Pemecahan Masalah	35
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	36
4.1 Hasil Penelitian	36
4.1.1 Gambaran Umum DPRD Kabupaten Jember	36
4.1.2 Deskripsi Responden	37
4.1.3 Karakteristik Responden	37
4.1.4 Analisis Deskriptif Statistik	39
4.1.5 Uji Kualitas Data	40
4.1.6 Analisis Data	43
4.2 Pembahasan	48
4.2.1 Pengaruh Persepsi Transparansi Terhadap Kinerja	48
4.2.2 Pengaruh Persepsi Akuntabilitas Terhadap Kinerja	50
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	53
5.1 Kesimpulan	53
5.2 Keterbatasan Penelitian	53
5.3 Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel :	Halaman
2.1 Penelitian Terdahulu	19
4.1 Deskriptif Kuesioner	37
4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	38
4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	38
4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan	39
4.5 Hasil Analisis Deskriptif Statistik.....	40
4.6 Hasil Uji Validitas	41
4.7 Hasil Uji Reliabilitas	43
4.8 Hasil Uji Normalitas	44
4.9 Uji Multikolinearitas	45
4.10 Hasil Regresi Linear berganda	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar :	Halaman
2.1 : Kerangka Konseptual	22
3.1 : Kerangka Pemecahan Masalah	35
4.1 : Hasil Uji Heteroskedastisitas	46



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :

1. KUESIONER PENELITIAN
2. HASIL REKAPUTULASI JAWABAN RESPONDEN
3. HASIL UJI VALIDITAS
4. HASIL UJI RELIABILITAS
5. HASIL UJI NORMALITAS
6. HASIL ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA
7. TABEL t
8. TABEL F

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839). Pada tahun 2004, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah hingga saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah adalah wewenang yang dimiliki daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya menurut kehendak sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim & Kusufi: 2013:1).

Saat ini otonomi daerah mendorong semua pemerintahan daerah di Indonesia untuk berbondong-bondong membangun daerahnya masing-masing. Tidak terkecuali kabupaten Jember. Semua program pembangunan daerah yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Jember semata-mata dilakukan untuk membangun daerah kabupaten Jember sebagai bentuk otonomi daerah yang diberlakukan di negara Indonesia. Untuk melaksanakan pembangunan itu sendiri maka disusunlah anggaran pendapatan dan belanja daerah di setiap tahunnya guna merealisasikan rencana pembangunan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Jember adalah daerah di Jawa Timur yang dipimpin oleh kepala daerah yang sama selama dua periode berturut-turut yang dimulai sejak tanggal 11 Agustus 2005 – 11 Agustus 2010 kemudian berlanjut mulai 25 September 2010 hingga saat ini. Terpilihnya kepala daerah dua kali berturut-turut ini secara tidak langsung memberi kesan baik dan positif bahwa kinerja pemerintah daerah selama periode jabatan kepala daerah tersebut telah berjalan dengan baik dan memuaskan bagi masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan hasil survei yang dilakukan oleh Politika Research Center yang menyimpulkan bahwa pencapaian terbaik pemerintah kabupaten Jember di bawah kepemimpinan bupati Ir. H. MZA. Djalal, M.Si adalah di sektor infrastruktur, ekonomi, pertanian dan perkebunan. Namun, hasil survei yang dilakukan juga menyimpulkan bahwa dibawah kepemimpinan beliau, terdapat 3 (tiga) sektor pencapaian yang kurang optimal, yakni pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sektor publik. Secara garis besar survei ini menyimpulkan bahwa kinerja pemerintahan selama satu periode dipersepsikan kurang memuaskan yang bahkan berlanjut hingga ke periode berikutnya. Tentunya penilaian kinerja ini sangat bertolak belakang dengan kesan yang tersirat atas terpilihnya kepala daerah selama 2 (dua) periode secara berturut-turut terlebih dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selama 3 tahun ini mengalami peningkatan secara signifikan.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Jember dalam 3 (tiga) tahun terakhir ini mengalami kenaikan di setiap tahunnya. APBD Kabupaten Jember Tahun 2014 mencapai Rp. 2,666 triliun, naik 12,06% atau Rp. 286,95 miliar dibandingkan APBD 2013 yang hanya Rp. 2,378 triliun. Kenaikan angka tersebut didapatkan karena sejumlah peningkatan, baik dari PAD yang naik hingga 51% dan di sektor belanja juga mengalami peningkatan sebesar Rp. 93,403 miliar. Sama halnya dengan peningkatan di tahun 2014, pada tahun 2015 ini APBD mengalami kenaikan di angka Rp. 2,9 triliun (Harjanto:2014). Tentunya kenaikan kenaikan APBD ini bertolak belakan dengan opini sebagian masyarakat yang menyatakan kurang puas dengan kinerja pemerintah daerah.

Pemerintah Daerah tidak berjalan sendiri dalam mengemban tugasnya untuk mengembangkan daerahnya serta mewujudkan cita-cita bangsa yakni keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yakni Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai mitra sejajar Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan daerah. Peran DPRD sendiri dalam pemerintahan daerah juga sangat penting, dimana DPRD ini menjalankan fungsinya sebagai mitra sekaligus pengawas dari kinerja Pemerintah Daerah. Sebagai contoh peran DPRD dalam pemerintahan yakni seperti yang tertuang dalam Undang-undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, dan DPRD yakni DPRD bertugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten. Ini membuktikan bahwa DPRD sejatinya juga memiliki fungsi pengawasan dalam penetapan keputusan dan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Maka dari itu sebagai wujud pertanggungjawaban atas segala program atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Jember, serta terwujudnya kinerja yang maksimal dan memuaskan bagi masyarakat selaku penikmat jasa, maka diperlukan pemerintahan yang transparan dan akuntabel dalam melakukan segala kegiatannya agar masyarakat secara langsung bisa mengawasi jalannya pembangunan itu sendiri. Selain dari keterbukaan yang dilakukan oleh pemerintah, pemahaman anggota legislatif tentang prinsip transparansi dan akuntabilitas juga harus ditingkatkan agar DPRD sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah menjalankan fungsinya dengan baik salah satunya adalah menjadi pengawas terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Lismawati (2013), menyatakan bahwa transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja SKPD Provinsi Bengkulu, demikian pula dengan hasil penelitian Meidawati (2012) juga menyimpulkan bahwa penerapan prinsip transparansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di kabupaten Situbondo. Hal ini

menunjukkan bahwa semakin transparan pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan maka akan semakin meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan.

Meidawati (2012), menyatakan bahwa akuntabilitas Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap kinerja satuan kerja Pemerintah Daerah, hal ini tentu saja akan berpengaruh terhadap kinerja satuan kerja Pemerintah Daerah. Pernyataan tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rohmah (2003). Hasil dari penelitian terdahulu membuktikan bahwa akuntabilitas dalam pemerintahan daerah diperlukan guna mewujudkan suatu kondisi yang akuntabel dalam pemerintahan daerah. Sehingga dengan terciptanya kondisi yang akuntabel, memudahkan pengawasan atas kinerja pemerintah itu sendiri dan dengan pengawasan yang baik akan menjadi pemicu kinerja pemerintahan yang semakin baik pula.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja pemerintahan dari sudut pandang eksekutif yakni Pemerintah Daerah sebagai pelaksana operasional kegiatan pemerintahan daerah. Dengan demikian, penelitian ini menganalisis pemahaman tentang transparansi dan akuntabilitas dari sudut pandang legislatif yakni anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Jember yang menurut Undang-Undang nomor 27 Tahun 2009 berfungsi sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah, pengawas pelaksanaan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

- a. Apakah transparansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember?
- b. Apakah akuntabilitas keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk :

- a. Menguji pengaruh transparansi laporan keuangan daerah terhadap kinerja Pemerintah Daerah kabupaten Jember;
- b. Menguji pengaruh akuntabilitas keuangan daerah terhadap kinerja Pemerintah Daerah kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat :

- a. Bagi Pemerintah Kabupaten Jember
Sebagai bahan masukan untuk referensi tentang pengetahuan akuntansi yang melibatkan peran transparansi dan akuntabilitas suatu entitas sektor publik (nirlaba) khususnya pemerintahan daerah (kabupaten) Jember.
- b. Bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jember
Sebagai bahan masukan untuk peningkatan pemahaman transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah dan hubungannya dengan kinerja Pemerintah Daerah.
- c. Bagi Peneliti Selanjutnya
Sebagai bahan masukan, referensi dan literatur bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian di rumpun akuntansi sektor publik yang berkaitan tentang transparansi dan akuntabilitas.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau yang sering disingkat DPRD adalah lembaga rakyat daerah yang melaksanakan fungsi-fungsi Pemerintah Daerah sebagai mitra sejajar Pemerintah Daerah. Fungsi utama DPRD adalah untuk mengontrol jalannya pemerintahan di daerah, maka kinerja optimal dari badan eksekutif (pemerintah daerah) adalah output yang diharapkan dari hubungan antara DPRD dengan pemerintah daerah/kabupaten. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai beberapa tugas dan wewenang dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang No. 27 tahun 2009 Tentang MPR, DPR, dan DPRD, diantaranya yakni :

- a. Membentuk peraturan daerah kabupaten bersama Kepala Daerah;
- b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja kabupaten yang disajikan oleh Kepala Daerah;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten;
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
- e. Memilih wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil Kepala Daerah (catatan bagian hukum);
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah kabupaten terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten;

- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten;
- i. Memberikan persetujuan terhadap rancangan kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- j. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.2 Fungsi DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah mempunyai fungsi yang diantaranya sebagai fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan dalam mengemban tugasnya sebagai penghubung aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Daerah seperti yang dijelaskan di situs dprd-jemberkab.go.id yang bersumber dari Undang-Undang No. 27 tahun 2009 Tentang MPR, DPR, dan DPRD antara lain :

- a. Fungsi legislasi diwujudkan dalam bentuk membentuk Peraturan Daerah bersama-sama Kepala Daerah
- b. Fungsi anggaran diwujudkan dalam membahas, memberikan persetujuan dan menetapkan APBD bersama Pemerintah Daerah
- c. Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Perundangan yang ditetapkan oleh Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

2.1.3 Hak-hak Yang Dimiliki DPRD

Anggota Dewan mempunyai hak-hak seperti hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat yang secara teknis membantu kelancaran dalam menjalankan tugasnya sebagai mitra kerja Pemerintah daerah juga sebagai penghubung aspirasi rakyat kepada Pemerintah Daerah, seperti yang tertulis dalam situs *dprd-jemberkab.go.id* yang bersumber dari Undang-Undang No. 27 tahun 2009 Tentang MPR, DPR, dan DPRD antara lain :

- a. Hak Interpelasi : adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Kepala Daerah mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan Negara;
- b. Hak Angket : adalah pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu kepala daerah yang penting dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara, yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Hak menyatakan pendapat : adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket;
- d. Pendapat diatur dalam peraturan tata tertib DPRD yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

2.1.4 Hak-hak Personal Yang Dimiliki Anggota DPRD

Selain mendapat hak-hak yang berhubungan dengan fungsinya sebagai mitra Pemerintah Daerah, anggota dewan juga diberikan hak-hak yang bersifat personal, dalam artian hak-hak tersebut melekat kepada tiap-tiap anggota tersebut selama periode jabatan anggota dewan. Hal ini seperti yang disebutkan dalam

situs *dprd-jemberkab.go.id* yang bersumber dari Undang-Undang No. 27 tahun 2009 Tentang MPR, DPR, dan DPRD antara lain :

- a. Hak mengajukan rancangan Peraturan Daerah
- b. Hak mengajukan pertanyaan
- c. Hak menyampaikan usul dan pendapat
- d. Hak memilih dan dipilih
- e. Hak membela diri
- f. Hak imunitas atau hak kekebalan hukum, yaitu anggota DPRD tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena pernyataan dan pendapat yang disampaikan dalam rapat-rapat DPRD.
- g. Hak protokoler atau hak anggota DPRD untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya dalam acara-acara kenegaraan atau acara resmi maupun dalam melaksanakan tugasnya
- h. Hak keuangan dan administrasi

2.1.5 Kewajiban Anggota DPRD

Anggota Dewan dalam mengemban tugas dan wewenangnya selain mempunyai hak-hak yang diberikan guna memberikan kinerja yang lebih baik, anggota dewan juga mempunyai kewajiban tertulis maupun tidak tertulis yang harus dipatuhi sebagai batasan atau aturan dalam melaksanakan tugasnya, seperti yang tercantum pada situs DPRD kabupaten Jember yang bersumber dari Undang-Undang No. 27 tahun 2009 Tentang MPR, DPR, dan DPRD antara lain :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan nilai-nilai yang tertuang dalam butir-butir Pancasila;
- b. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati peraturan perundang-undangan;
- c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- d. Mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. Memperjuangkan semua aspirasi dan pengaduan masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kualitas kesejahteraan rakyat;
- f. Mentaati prinsip demokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;
- g. Mentaati tata tertib dan kode etik yang tertulis maupun yang tidak tertulis;
- h. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam pemyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- i. Menyerap, menghimpun, aspirasi kenstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. Menampung dan menindaklanjuti semua aspirasi, saran, kritik dan pengaduan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Daerah setempat; dan
- k. Memberikan pertanggung jawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihnya.

2.1.6 Transparansi dan Akuntabilitas

2.1.6.1 Pengertian Tansparansi

Sesuai dengan Undang-Undang nomor 27 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa salah satu fungsi DPRD adalah fungsi pengawasan yang berarti DPRD sebagai mitra pemerintah daerah berfungsi sebagai pengontrol kinerja pemerintah daerah agar berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan di awal. Namun fungsi ini tidak akan berjalan sesuai dengan baik apabila tidak didukung dengan keterbukaan eksekutif (pemerintah daerah) kepada legislatif. Keterbukaan pemerintah daerah kepada DPRD akan sangat membantu dan mempermudah jalannya fungsi DPRD sebagai pengawas kinerja pemerintah daerah/kabupaten. Transparansi merupakan wujud keterbukaan pemerintah daerah terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dan salah satunya adalah badan legislatif (DPRD).

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam melaksanakan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan salah satunya transparansi. Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010:7). Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Krina, dalam Rohmah, 2012). Hal ini sejalan dengan pendapat Haryatmoko (2011:112) yang meberikan pemahamannya terhadap konsep transparansi bahwa, “organisasi pemerintah bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan dengan memberi informasi yang relevan atau laporan yang terbuka terhadap pihak luar atau organisasi mandiri (legislator, auditor, publik) dan dipublikasikan.”

2.1.6.2 Pengertian Akuntabilitas

Accountability is the duty of an entity to use (and prevent the misuse) of the resources entrusted it in a effective, efficient and economical manner, within the boundaries of the moral and legal framework of the society and to provide an acoount of its actions to accountees who are not only the persons who provided it with its financial resources but to groups within society and society at large “(Gray et al., 1996 dalam Rohmah, 2012)

Menurut Mardiasmo (2009:20) akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi

tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu berfungsinya seluruh komponen penggerak jalannya kegiatan perusahaan, sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing (Toha dalam Hartanti, 2011).

Akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks yang lebih sulit mewujudkannya dari pada memberantas korupsi (Turner and Hulme dalam Mardiasmo , 2009). Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk menekankan pada pertanggungjawaban horizontal bukan hanya pertanggung jawaban vertikal tuntutan yang kemudian muncul adalah perlunya dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik (Mardiasmo, 2009:21)

Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi. Terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik menurut Ellwood (dalam mardiasmo, 2009), yaitu :

- a. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum;
- b. Akuntabilitas proses;
- c. Akuntabilitas program; dan
- d. Akuntabilitas kebijakan

2.1.7 Keuangan Daerah

2.1.7.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlaku untuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Pembentukan dan pengelolaannya disesuaikan dengan tata cara yang berlaku pada pemerintah pusat. Pendapatan daerah provinsi seperti yang tertulis dalam UU No. 28 Tahun 2009, pajak pusat diserahkan kepada daerah pemerintah pusat, antara lain : pajak rumah tangga,

pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok. Pemerintah kabupaten/kota mendapatkan penghasilan dari berbagai pajak daerah antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Undang-Undang No 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 17 menyebutkan bahwa APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD merupakan rencana keuangan tahunan daerah, dimana disatu sisi menggambarkan anggaran pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek daerah dalam satu tahun anggaran dan disisi lain menggambarkan penerimaan daerah guna membiayai pengeluaran yang telah dianggarkan.

APBD dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana pada satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah selama satu tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang di maksud. Sedangkan definisi APBD pada orde lama adalah kegiatan badan legislatif (DPRD) memberikan kreit kepada badan eksekutif (kepala daerah) untuk melakukan pembiayaan guna kebutuhan rumah tangga daerah sesuai dengan rancangan yang menjadi dasar (*grondslog*) penetapan anggaran dan yang menunjukkan semua penghasilan untuk menutup pengeluaran. Dari kedua defini tersebut, menunjukkan bahwa APBD sebagai anggaran daerah memiliki unsur-unsur sebagai berikut (Halim, 2013:37-38) :

- a. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara terperinci;
- b. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya terkait aktivitas tersebut, dan adanya biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan;
- c. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka; dan
- d. Periode anggaran biasanya satu tahun.

2.1.7.2 Pengelolaan Penerimaan Daerah

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 pasal 157 dan UU No. 33 tahun 2004 pasal 6, serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan UU No. 28 tahun 2009, Total Pendapatan Daerah (TPD) diperinci sebagai berikut :

- a. Pendapatan Asli Daerah
Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan yang digali dari dalam wilayah yang bersangkutan. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan pendapatan asli daerah lain-lain yang sah.
- b. Pendapatan Transfer
Sumber-sumber pendapatan transfer atau bisa disebut juga sebagai bantuan dari pemerintah pusat/propinsi salah satunya adalah dana perimbangan. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBD yang dialokasikan Kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pos-pos dana perimbangan tersebut terdiri dari bagian daerah dari pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi umum seperti yang tertera pada UU No. 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 1 dan 2;
- c. Transfer Pemerintah Pusat lainnya yang terdiri dari dana otonomi khusus dan dana penyesuaian;
- d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2.1.7.3 Pengelolaan Pengeluaran Daerah

Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa pengeluaran daerah adalah semua pengeluaran kas daerah periode tahun anggaran yang bersangkutan yang meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung.

- a. Belanja Langsung, adalah belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya program dan kegiatan yang direncanakan. Jenis Belanja Langsung dapat berupa Belanja Pegawai/Personalia, Belanja Barang/ Jasa, Belanja Pemeliharaan dan Belanja Perjalanan Dinas.
- b. Belanja Tidak Langsung, adalah belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan. Jenis Belanja Tidak Langsung dapat berupa Belanja Pegawai/Personalia. Belanja Barang/Jasa. Belanja pemeliharaan dan Belanja Perjalanan Dinas.

2.1.7.4 Kemampuan Keuangan Daerah

Kriteria penting yang lain untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan daerah dalam bidang keuangan, dengan kata lain faktor keuangan merupakan faktor yang penting dalam mengatur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka menyelenggarakan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD. Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan tersebut, keuangan daerah sebagai salah satu indikator untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 , 2005).

Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan tersebut, keuangan daerah sebagai salah satu indikator untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang tentang otonomi daerah, membawa konsekuensi bagi daerah yang akan menimbulkan perbedaan antar daerah yang satu dengan yang lainnya, terutama dalam hal kemampuan keuangan daerah antara lain (Nataludin dalam Hasbi, 2012:21)

- a. Daerah yang mampu melaksanakan otonomi daerah;
- b. Daerah yang mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah;
- c. Daerah yang sedikit mampu melaksanakan otonomi daerah; dan
- d. Daerah yang kurang mampu melaksanakan otonomi daerah.

2.1.7.5 Komponen Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (2010:8), Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan berbasis akrual terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, komponen yang dilaporkan adalah sebagai berikut:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Laporan Operasional;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Neraca;
- f. Laporan Arus Kas;
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

2.1.8 Kinerja dan Penilaian Kinerja

Kinerja berasal dari kata *job performance* atau *actual performance* yang berarti prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang. Penertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. *Performance* atau kinerja merupakan hasil atau keluaran dari suatu proses. Kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi, maka seluruh aktifitas dalam organisasi harus dinilai (Nurlaila, 2010:71).

Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan *reward and punishment system* (Mardiasmo, 2009:121). Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. *Pertama*, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik. *Kedua*, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. *Ketiga*, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Mardiasmo, 2009:121).

Pengukuran kinerja merupakan jembatan antara perencanaan strategis dengan akuntabilitas. Suatu instansi pemerintah dikatakan berhasil jika terdapat bukti-bukti atau indikator-indikator atau ukuran-ukuran pencapaian yang mengarah pada pencapaian misi. Dengan disusunnya rencana strategis yang jelas

dan perencanaan operasional yang terukur, maka dapat diharapkan tersedia kebenaran yang logis dan argumentasi yang memadai untuk menyatakan suatu program itu dikatakan berhasil atau tidak. Menurut Mardiasmo (2009:122) ada beberapa tujuan pengukuran kinerja secara umum yakni :

- a. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik;
- b. Untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi;
- c. Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawahan serta memotivasi untuk pencapaian *goal congruance*;
- d. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif rasional.

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tingkat transparansi dan akuntabilitas pada saat ini sudah menjadi salah satu syarat terciptanya *Good governance* di tingkat eksekutif (pemerintah) maupun di lembaga-lembaga sektor publik diluar pemerintahan, bahkan saat ini transparansi dan akuntabilitas bukan lagi sekedar tuntutan para pemberi amanah kepada penerima amanah untuk melaporkan hasil kerjanya. Namun transparansi dan akuntabilitas seolah sudah menjadi kesadaran bagi entitas sektor publik untuk mempertanggungjawabkan semua proses kegiatan secara terbuka dan akuntabel kepada para pemberi amanah. Keterbukaan dan akuntabilitas yang relatif tinggi, akan memberi dampak positif terhadap kinerja entitas sektor publik, dikarenakan semakin tingginya tingkat keterbukaan dan kesadaran dalam melaporkan segala pencapaiannya maka semakin tinggi pula tingkat pengawasan dari publik dan semakin kecil pula resiko kecurangan yang terjadi di dalamnya. Berikut adalah beberapa penelitian mengenai transparansi dan akuntabilitas serta hubungannya dengan kinerja di entitas sektor publik :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama	Judul Penelitian	Alat Uji	Uraian Hasil
Masiyah Kholmi (2003)	Persepsi Pengurus Partai Terhadap Akuntabilitas Keuangan Partai Politik	Independent T-Test	Hasil dari penelitian ini diperoleh kesimpulan yakni diperlukan tiga katagori akuntabilitas keuangan dalam mengelola organisasi partai politik, yaitu akuntabilitas keuangan tahunan; akuntabilitas keuangan dana kampanya; dan akuntabilitas keuangan dana bantuan APBD.
Lailatur Rohmah (2012)	Persepsi Mahasiswa Akuntansi Unesa Tentang Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Partai politik Terhadap Kinerja Partai dan Upaya Pemberantasan Kejahatan KeraH Putih	Independent t-Test	Hasil dari penelitian ini meunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik masih rendah berpengaruh terhadap menurunnya kinerja partai politik dan kejahatan keraH putih di Indonesia susah diminimalisir. Mahasiswa mengharapkan kinerja politik akan meningkat kembali setelah mengalami penurunan, dan transparansi menjadi alat untuk mengembalikannya
Refki Saputra (2013)	Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Dana Kampanye Melalui Pembatasan Transaksi Keuangan Tunai	Independent t-Test	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa maraknya transaksi keuangan tunai berkorelasi dengan tingginya angka korupsi dan pencucian uang di Indonesia. Dikarenakan sifat dari uang tunai yang tergolong aset yang tidak bernama seringkali digunakan dalam tindak pidana karena akan menyulitkan penegak hukum untuk melakukan pelacakan

			terhadap pelaku tindak pidana tersebut.
Karina Hartanti (2011)	Pandangan Publik Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah	Independent t-test	Pandangan publik mengenai akuntabilitas di Provinsi Jawa Tengah menstimulasi kinerja Pemerintah Daerah setempat untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik dikarenakan pandangan publik tentang prinsip akuntabilitas sendiri sudah mulai mengalami kemajuan, sehingga pengawaan publik terhadap kinerja Pemerintah Daerah semakin kritis.
Nurida Meidawati (2012)	Analisis Pengaruh Persepsi Penerapan Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah	Independent t-Test	Penerapan transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan di Satuan Kerja Pemerintah daerah (SKPD) kabupaten Situbondo menunjukkan hasil yang signifikan positif terhadap kinerjanya. Dikarenakan konsep transparansi dan akuntabilitas sangat membantu dalam mengawasi jalannya program yang dijalankan oleh pemerintah.
Lismawati (2013)	Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah	Independent t-test	Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintahan daerah daerah. Dengan demikian semakin akuntabel dan transparannya pengelolaan keuangan daerah di setiap SKPD maka akan dapat meningkatkan kinerja pemerintah provinsi Bengkulu.

Sumber : Data diolah dari berbagai referensi, 2014

2.3 Kerangka Konsep Penelitian

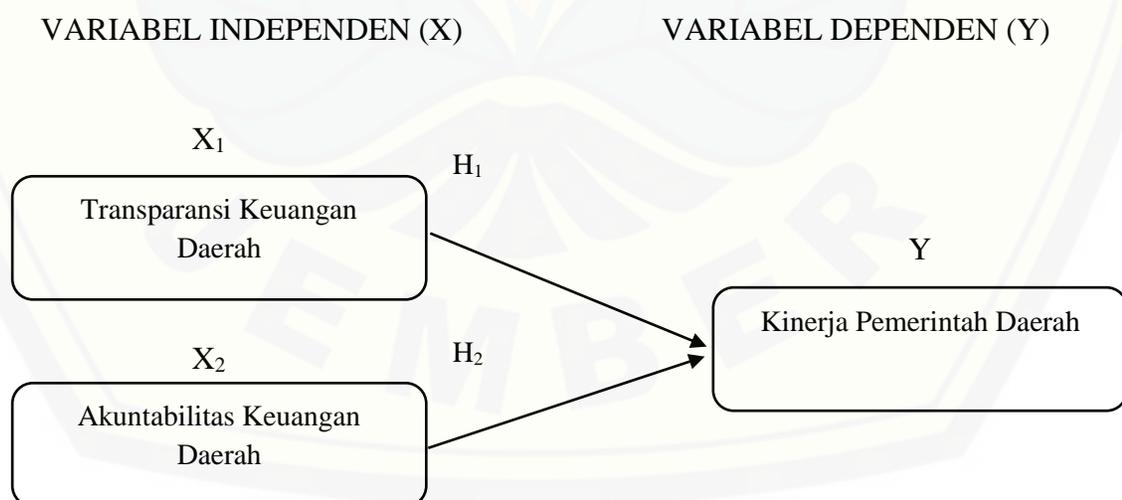
Pengetahuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan daerah sebagai pengetahuan yang membantu para Anggota DPRD ini dalam mengawasi kinerja Pemerintah Daerah tentunya menjadi salah satu faktor yang bisa mempengaruhi kinerja Pemerintah Daerah agar supaya dapat memberikan kinerja yang lebih baik dimasa baktinya. Pemahaman anggota dewan mengenai prinsip transparansi dan akuntabilitas baik secara teoritis maupun secara praktis saat ini sangat diperlukan, karena DPRD selaku mitra kerja pemerintah daerah juga mempunyai fungsi lain yakni sebagai pengawas kinerja pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Transparansi adalah upaya untuk memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan, (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 71 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010:7). Dengan penerapan pemerintahan yang transparan diharapkan masyarakat luas dengan mudah ikut mengawasi jalannya proses pemerintahan sehingga kinerja aparat Pemerintah Daerah menjadi semakin terkendali dan potensi dalam melakukan kecurangan selama proses pemerintahan berlangsung dapat diminimalisir.

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2009:20). Akuntabilitas publik Pemerintah Daerah erat hubungannya dengan kinerja Pemerintah Daerah itu sendiri, dikarenakan pengawasan kinerja tidak bisa

memberikan hasil yang maksimal jika pihak yang diawasi kurang memiliki kesadaran untuk bersikap jujur dan terbuka, dengan akuntabilitas yang tinggi maka akan muncul kesadaran dari Pemerintah Daerah selaku pemegang amanah untuk mempertanggungjawabkan semua yang telah dilaksanakan kepada *stakeholders* selaku pemberi amanah secara jujur dan terbuka. Oleh karena itu, dari pengembangan logika tentang hubungan transparansi dan akuntabilitas dengan kinerja tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisa persepsi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang transparansi dan akuntabilitas tentang laporan keuangan daerah serta pengaruhnya dengan kinerja Pemerintah Daerah kabupaten Jember.

Berdasarkan masalah tersebut maka dalam penelitian ini menghubungkan atau mencari hubungan antara tiga variabel yang akan diteliti. Variabel pertama (X_1) dan kedua (X_2) yang berperan sebagai variabel independen adalah “Transparansi Keuangan Daerah (X_1) dan Akuntabilitas Keuangan Daerah (X_2)” sedangkan untuk variabel kedua yang berperan sebagai variabel dependen (dipengaruhi) adalah “Kinerja Pemerintah Daerah (Y)”. Untuk lebih jelasnya ketiga variabel diatas diilustrasikan dalam gambar dibawah ini :



Gambar 2.1. Kerangka Konseptual Penelitian

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Transparansi Keuangan Daerah dan Kinerja Pemerintah Daerah

Transparansi merupakan hak dasar untuk mengetahui informasi tentang apa yang sedang diprogramkan oleh pemerintah dan mengapa program itu dipilih dan dibiayai. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan dalam memperoleh informasi, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan (Mardiasmo, 2009:18). Transparansi dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas dan kewenangan, ketersediaan informasi kepada publik, proses penganggaran yang terbuka, dan jaminan integritas dari pihak independen mengenai prakiraan fiskal, informasi dan penjabarannya.

Transparansi juga memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk ikut mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh sebuah instansi sektor publik dimana dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah. Dengan konsep transparansi ini pula tidak menutup kemungkinan akan meminimalisir kesalahan yang berpotensi terjadi di pemerintahan. Seperti tidak konsistennya hasil program dengan rencana yang telah disusun, atau tidak efektif, efisien, dan ekonomisnya anggaran yang telah disusun sedemikian rupa dengan realisasinya. Dengan transparansi ini memungkinkan kinerja pemerintahan yang lebih baik karena akan lebih banyak “mata” yang akan mengawasi kinerja Pemerintah Daerah.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Lismawati (2013) menyimpulkan bahwa antara transparansi dan kinerja mempunyai pengaruh yang signifikan dimana semakin tinggi tingkat transparansi yang dilakukan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah di Provinsi Bengkulu maka semakin tinggi juga tingkat kinerja para pegawai di Satuan Kerja Pemerintahan Daerah Provinsi Bengkulu. Hasil penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian Rohmah (2012) yang menyimpulkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap kinerja partai politik dengan demikian hipotesis pertama dapat dirumuskan sebagai berikut :

H₁: Transparansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah daerah Kabupaten Jember.

2.4.2 Akuntabilitas Keuangan Daerah dan Kinerja Pemerintah Daerah

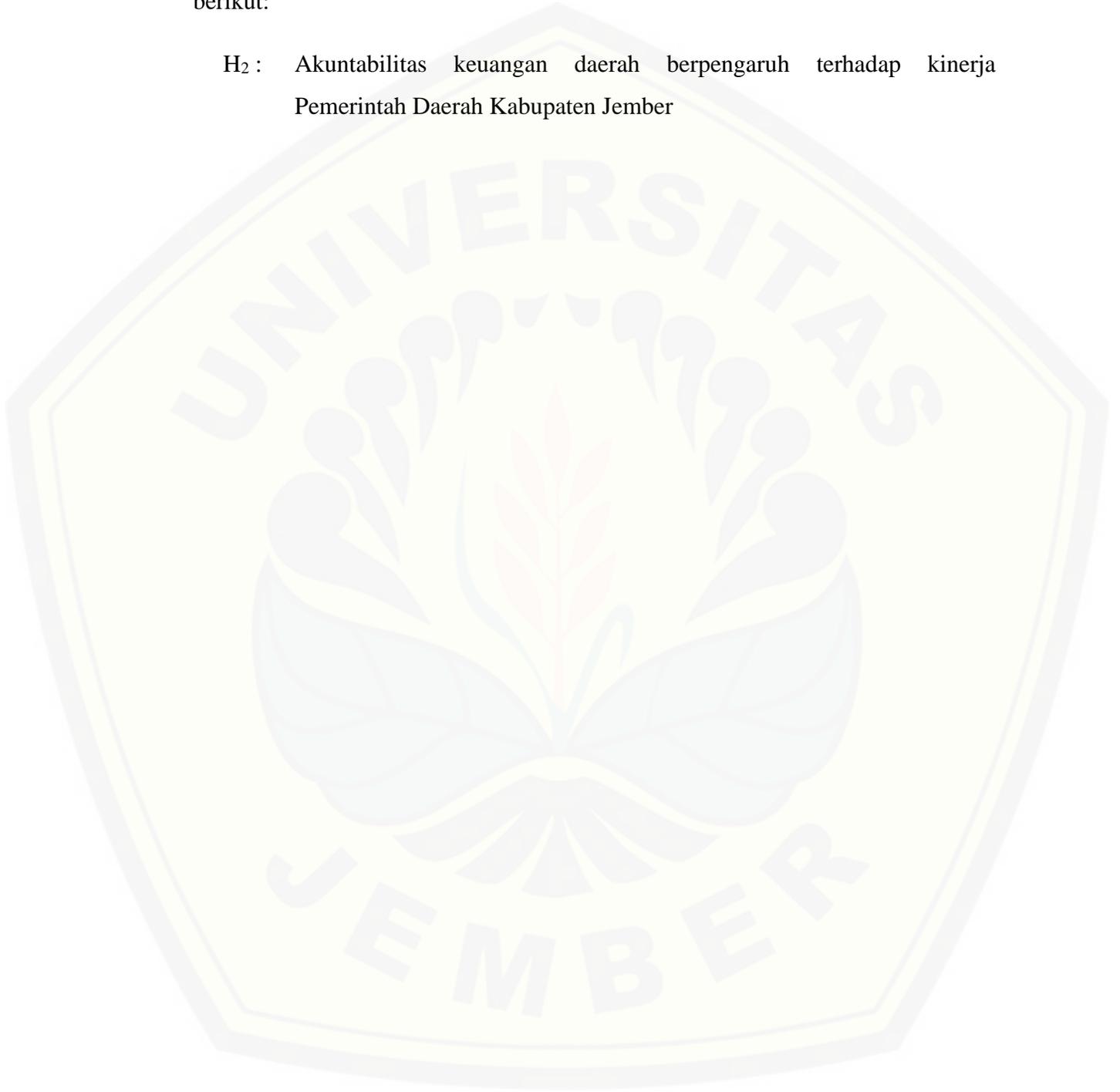
Menguatnya tuntutan akan akuntabilitas pada perkembangan sektor publik di Indonesia dimana akuntabilitas dan kejelasan atas pertanggungjawaban kinerja dari setiap instansi pemerintahan menjadi salah satu yang sangat dituntut oleh masyarakat. akuntabilitas dapat diartikan sebagai dasar pelaporan keuangan yang didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya (GASB dalam Mardiasmo 2009:3). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas memungkinkan masyarakat untuk menilai pertanggungjawaban pengguna anggaran atas semua aktivitas yang dilakukan (pemerintah).

Konsep akuntabilitas itu sendiri bisa diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat tentang kinerja atau kegiatan operasional yang dilakukan. Mindset akan akuntabilitas yang ditanamkan oleh sebuah instansi sektor publik, memberikan sebuah pemahaman bahwa mereka mempunyai sebuah kewajiban kepada masyarakat untuk menyampaikan apa yang telah dicapai sebagai bentuk pertanggungjawaban layaknya petinggi suatu perusahaan kepada para pemilik modal. Dengan demikian dibutuhkan konsep akuntabilitas untuk memacu kinerja suatu instansi sektor publik seperti pemerintahan daerah.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Meidawati (2012) menyimpulkan bahwa antara akuntabilitas dan kinerja mempunyai pengaruh yang signifikan positif dimana semakin tinggi tingkat Akuntabilitas yang dilakukan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah di kabupaten Situbondo maka semakin tinggi juga tingkat kinerja para pegawai di Satuan Kerja Pemerintahan Daerah kabupaten Situbondo. Hal serupa juga dinyatakan dalam penelitian Hartanti (2011) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah

di Provinsi Jawa Tengah. Maka hipotesis kedua dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₂ : Akuntabilitas keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember



BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut Indriantoro dan Supomo (2012:147), data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkan data secara langsung sehingga teknik pengumpulan data primer yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan alamat Jalan Kalimantan No. 86 kecamatan Sumbersari kabupaten Jember.

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu (Indriantoro dan Supomo, 2012:115). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember yang beranggotakan 45 orang yang berada di komisi A, B, C dan D. Sampel adalah bagian dari populasi yang dipercaya dapat mewakili karakteristik populasi secara keseluruhan. Peneliti tidak perlu menggunakan sampel jika elemen populasi terlalu heterogen ataupun jumlah populasinya relatif sedikit (kurang dari 100) karena perhitungan sampel dengan jumlah populasi yang kurang dari 100 akan menghasilkan jumlah sampel yang sangat sedikit. Hal ini akan membuat hasil penelitian menjadi kurang akurat, jika

jumlah populasi penelitian kurang dari 100, sebaiknya seluruh anggota populasi dijadikan sebagai sampel (Sarjono, 2013:22).

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber asli (Indriantoro dan Supomo, 2012:147). Dalam mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkan data secara langsung sehingga teknik pengumpulan data primer yang digunakan peneliti dalam penelitian ini atau sumber data adalah dengan melakukan penyebaran kuisisioner kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Jember.

3.5 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.5.1 Transparansi

Transparansi adalah upaya untuk memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan, (Standar Akuntansi Pemerintahan:2010:7). Teknik pengukuran menggunakan pertanyaan yang diadopsi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sopanah (2004), menggunakan skala Likkert dengan penilaian 1 sampai 5 yakni SS (sangat setuju) dengan nilai 5, S (setuju) dengan nilai 4, TT (tidak tahu) dengan nilai 3, TS (tidak setuju) dengan nilai 2, STS (sangat tidak setuju) dengan nilai 1. Indikator yang digunakan dalam pengukuran ini antara lain adalah:

- a. komunikasi publik oleh pemerintah
- b. hak masyarakat terhadap akses informasi
- c. ketepatan dalam pelaporan dan
- d. kualitas informasi yang disampaikan.

3.5.2 Akuntabilitas

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*Agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*Principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut, (Mardiasmo:2010:20). Akuntabilitas juga sering disamakan arti dengan *responsibility*, namun secara harfiah akuntabilitas bermakna lebih menekankan pertanggungjawaban pada sebuah instansi sektor publik kepada para pemakai produk jasanya, untuk mengukurnya, dalam penelitian ini menggunakan pertanyaan yang diadopsi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sopanah (2004), dengan menggunakan skala Likkert dengan penilaian 1 sampai 5 yakni SS (sangat setuju) dengan nilai 5, S (setuju) dengan nilai 4, TT (tidak tahu) dengan nilai 3, TS (tidak setuju) dengan nilai 2, STS (sangat tidak setuju) dengan nilai 1. Indikator yang digunakan dalam pengukuran ini antara lain adalah:

- a. akuntabilitas hukum dan kejujuran
- b. akuntabilitas proses
- c. akuntabilitas program dan
- d. akuntabilitas kebijakan.

3.5.3 Kinerja

Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial (Mardiasmo. 2009:121). Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel ini adalah indikator yang diadopsi dari penelitian yang diambil dari situs www.kuesionerpemerintahdaerah.go.id dan dikembangkan oleh Meidawati (2012) yang diukur dengan menggunakan skala Likkert dengan skala penilaian 1 sampai 5 yakni SS (sangat setuju) dengan nilai 5, S (setuju) dengan nilai 4, TT (tidak tahu) dengan nilai 3, TS (tidak setuju)

dengan nilai 2, STS (sangat tidak setuju) dengan nilai 1. Indikator kinerja terdiri dari pernyataan yang berkaitan dengan:

- a. penetapan kinerja
- b. pengukuran kinerja
- c. pencapaian kinerja (*output*)
- d. pencapaian kinerja (*outcome*)
- e. penyajian informasi kinerja
- f. pemanfaatan informasi kinerja

3.6 Teknik dan Alat Perolehan Data

Dalam mengukur data, teknik pengukuran yang digunakan adalah dengan menggunakan skala likert dengan penilaian 1 sampai 5 yakni SS (sangat setuju) dengan nilai 5, S (setuju) dengan nilai 4, TT (tidak tahu) dengan nilai 3, TS (tidak setuju) dengan nilai 2, STS (sangat tidak setuju) dengan nilai 1. Responden hanya cukup memberikan yang telah disediakan yang telah disertakan poin di dalamnya untuk menjawab setiap pertanyaan tersebut. Sedangkan untuk variabel yang digunakan peneliti pada penelitian ini adalah transparansi, akuntabilitas keuangan dan kinerja Pemerintah Daerah.

Alat yang digunakan adalah kuesioner yang telah disusun sedemikian rupa guna memperoleh data primer yang disebarkan langsung kepada tiap-tiap responden (populasi). Susunan kuesioner yang diberikan adalah sebagai berikut :

- a. Halaman depan berupa sampul yang memuat judul penelitian, logo Universitas Jember sebagai identitas peneliti serta prakata peneliti kepada subjek yang akan memberikan informasi (data);
- b. Halaman kedua berisi lembar identifikasi responden dan petunjuk pengisian kuesioner;
- c. Halaman ketiga berisi butir-butir pertanyaan yang berkaitan dengan Transparansi;

- d. Halaman keempat berisi butir-butir pertanyaan yang berkaitan dengan Akuntabilitas;
- e. Halaman kelima berisi butir-butir pertanyaan yang berkaitan dengan Kinerja.

3.7 Metode Analisis Data

3.7.1 Uji Kualitas Data

Mengingat pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner, maka kualitas dan kesanggupan responden dalam menjawab pertanyaan merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian ini. Apabila alat yang digunakan dalam proses pengumpulan data tidak valid, maka hasil penelitian yang diperoleh tidak mampu menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan dimulai dengan pengujian validitas dan realibilitas terhadap daftar pertanyaan yang digunakan dalam kuesioner.

a. Uji Validitas

Validitas adalah bukti bahwa instrumen, teknik, atau proses yang digunakan untuk mengukur sebuah konsep benar-benar mengukur konsep yang dimaksudkan (Sarjono, 2013:25). Uji validitas dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur penelitian dalam melakukan fungsi ukurnya. Uji validitas sebagai alat ukur dalam penelitian ini, yaitu menggunakan korelasi *product moment pearson's*, yaitu dengan cara mengkorelasikan tiap pertanyaan dengan skor total, kemudian hasil korelasi tersebut dibandingkan dengan angka kritis taraf signifikan 5% (Prayitno, 2010:90).

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sudah valid untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten. Kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan yang ada dalam kuesioner tersebut adalah konsisten dari waktu ke waktu. Pengujian ini dilakukan untuk menunjukkan sejauh mana suatu hasil

pengukuran relatif konsisten. Suatu pertanyaan atau pernyataan yang baik adalah pertanyaan atau pernyataan yang jelas mudah dipahami dan memiliki interpretasi yang sama meskipun disampaikan kepada responden yang berbeda dan waktu yang berlainan. Uji reliabilitas menggunakan *cronbach's alpha*. Suatu instrument dikatakan reliabel apabila *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,60 (Prayitno, 2010:97).

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

Setelah memperoleh model regresi linier berganda, maka langkah selanjutnya yang dilakukan apakah model yang dikembangkan bersifat BLUE (*Best Linier Unbised Estimator*). Metode ini mempunyai kriteria bahwa pengamatan harus mewakili variasi minimum, konstanta, dan efisien. Asumsi BLUE yang harus dipenuhi antara lain: data berdistribusi normal, model berdistribusi normal, tidak ada multikolinearitas, tidak terjadi heteroskedastisitas dan tidak terjadi autokorelasi.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang dilakukan terhadap sampel dilakukan dengan menggunakan *kolmogorov-smirnov test* dengan menetapkan derajat keyakinan (α) sebesar 5%. Uji ini dilakukan pada setiap variabel dengan ketentuan bahwa jika secara individual masing-masing variabel memenuhi asumsi normalitas, maka secara simultan variabel-variabel tersebut juga bisa dinyatakan memenuhi asumsi normalitas (Baroroh, 2013:23). Kriteria pengujian dengan melihat besaran *kolmogorov-smirnov test* adalah;

- a) Jika signifikansi $> 0,05$ maka data tersebut berdistribusi normal
- b) Jika signifikansi $< 0,05$ maka data tersebut tidak berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah pengujian dari asumsi untuk membuktikan bahwa variabel-variabel bebas dalam suatu model tidak saling berkorelasi satu dengan lainnya. Adanya multikolinearitas dapat menyebabkan model regresi yang diperoleh tidak valid untuk menaksir variabel independen. Gejala multikolinearitas juga dapat dideteksi dengan melihat besarnya VIF (*Variance Inflation Factor*). Latan (2013:61), menyatakan bahwa indikasi multikolinearitas pada umumnya terjadi jika VIF lebih dari 10, maka variabel tersebut mempunyai persoalan multikolinieritas dengan variabel bebas lainnya.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dari pola gambar scatterplot model tersebut (Latan, 2013:66). Dasar pengambilan keputusan antara lain :

- 1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik (point-point) yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka telah terjadi heteroskedastisitas;
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.7.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis Regresi Linear Berganda merupakan salah satu analisis yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain. Dalam analisis regresi variabel yang mempengaruhi disebut *independent variable* (variabel bebas) dan variabel yang dipengaruhi disebut *dependent variable* (variabel terikat). Jika dalam persamaan regresi hanya terdapat salah satu variabel bebas dan satu variabel terikat, maka disebut sebagai regresi sederhana, sedangkan

jika variabelnya bebasnya lebih dari satu, maka disebut sebagai persamaan regresi berganda (Prayitno, 2010:61).

Untuk mengetahui pengaruh persepsi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tentang Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Jember, digunakan analisis regresi linier berganda sebagai berikut (Prayitno, 2010:61) :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

a = bilangan konstanta

b_1 = besarnya pengaruh persepsi transparansi

b_2 = besarnya pengaruh persepsi akuntabilitas

X_1 = Transparansi

X_2 = Akuntabilitas

Y = kinerja pemerintah

e = faktor gangguan

3.7.4 Uji Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui signifikansi dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat yang terdapat dalam model. Uji hipotesis yang dilakukan adalah :

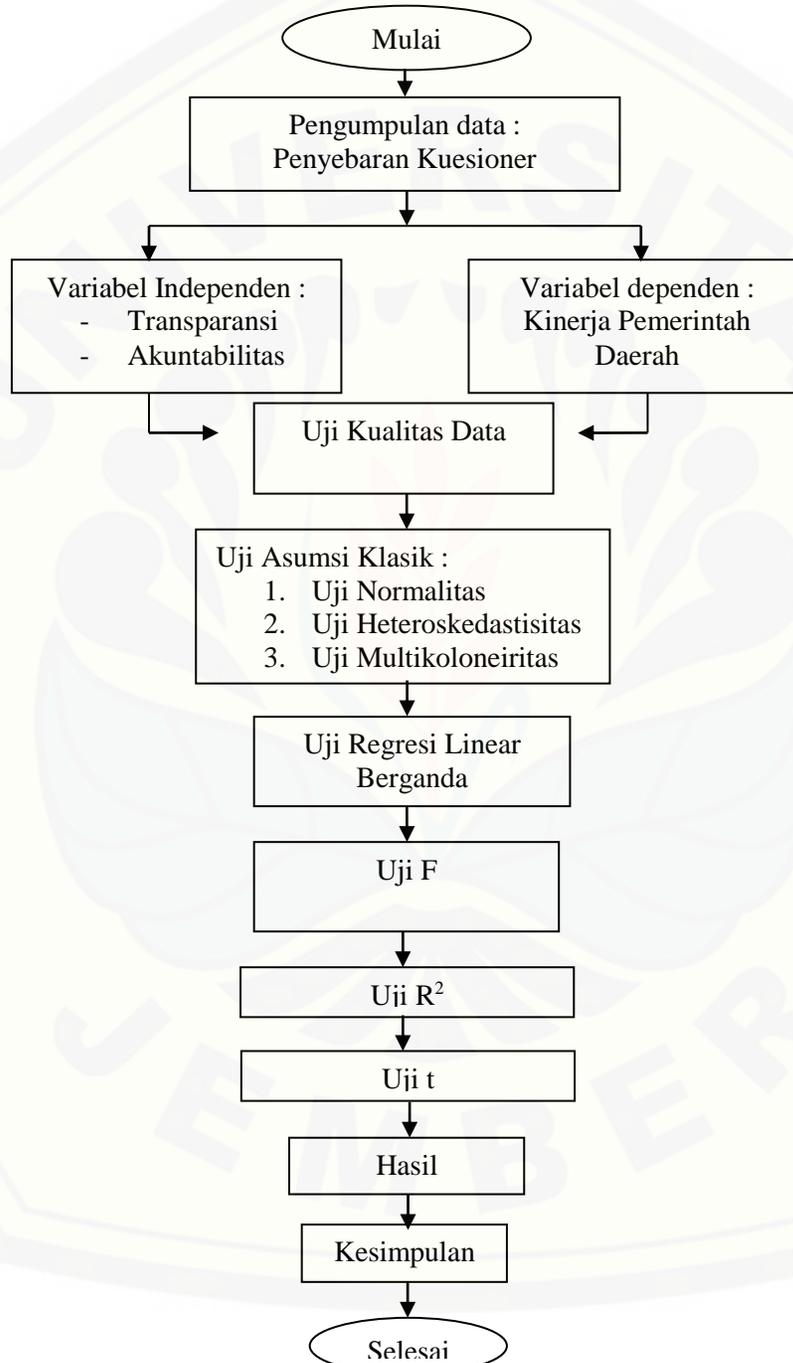
a. Uji F

Uji F digunakan untuk melihat signifikansi pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat (Prayitno, 2010:67). Dalam penelitian ini uji F digunakan untuk melihat signifikansi pengujian model dari variabel X_1 , dan X_2 , terhadap variabel Y . Dengan ketentuan :

- 1) $H_0 : b_1, b_2 \neq 0$
 H_0 ditolak dan H_a diterima, ada pengaruh antara variabel bebas (X_1 , dan X_2) terhadap variabel terikat (Y)
 - 2) $H_a : b_1, b_2 = 0$
 H_0 diterima dan H_a ditolak, tidak ada pengaruh antara variabel bebas (X_1 , dan X_2) terhadap variabel terikat (Y)
 - 3) *Level of significane 5%*.
- b. Uji R^2 (Koefisien Determinasi)
- Koefisien determinasi adalah data untuk mengetahui seberapa besar prosentase pengaruh langsung variabel bebas yang semakin dekat hubungannya dengan variabel terikat atau dapat dikatakan bahwa penggunaan model tersebut bisa dibenarkan. Dari koefisiensi determinasi (R^2) dapat diperoleh suatu nilai untuk mengukur besarnya sumbangan dari beberapa variabel X terhadap variasi naik turunnya variabel Y (Prayitno, 2010:66).
- c. Uji t
- Analisis ini digunakan untuk membuktikan signifikan tidaknya pengaruh persepsi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tentang Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Jember. Rumusnya adalah (Prayitno, 2010:68) ;
- Formulasi hipotesis uji t ;
- 1) $H_0 : b_i = 0, i = 1, 2$
 H_0 diterima dan H_a ditolak, tidak ada pengaruh secara parsial (individu) antara variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y)
 - 2) $H_a : b_i \neq 0, i = 1, 2$
 H_0 ditolak dan H_a diterima, ada pengaruh secara parsial (individu) antara variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y)
 - 3) *Level of significane 5%* (Uji 2 sisi, $5\% : 2 = 2,5\%$ atau 0,025)

3.8 Kerangka Pemecahan Masalah

Gambaran mengenai kerangka pemecahan masalah atau kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.



Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember.

Bertempat di Jalan Kalimantan No. 86, para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember ini melaksanakan tugasnya. Dengan mengusung Visi “Terwujudnya kinerja yang profesional untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas pokok DPRD Kabupaten Jember” dimana fungsi tersebut dimaksudkan untuk menjadikan Sekretariat DPRD Kabupaten Jember menjadi lembaga yang profesional dalam memfasilitasi kegiatan DPRD kabupaten Jember dalam rangka meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja lembaga perwakilan rakyat daerah. Serta dengan mengusung Misi “Meningkatkan profesionalisme aparatur yang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai; dan memberikan dukungan administrasi dan keuangan yang dibutuhkan oleh DPRD Kabupaten Jember sesuai dengan peraturan perundang-undangan” dengan maksud agar SDM sekretariat DPRD Kabupaten jember dapat melaksanakan secara optimal dalam rangka memfasilitasi kegiatan DPRD Kabupaten Jember.

DPRD Kabupaten Jember beranggotakan 45 orang yang terbagi ke dalam 4 komisi dan dari tiap-tiap komisi juga adalah bagian dari badan-badan yang terbentuk di dalamnya. Dari 45 anggota tersebut terbagi ke dalam komisi A, B, C dan D. Sedangkan dari masing-masing komisi juga adalah bagian dari Badan Musyawarah, Badan Kehormatan, Badan Anggaran dan Badan legislasi Daerah.

Dari 45 anggota yang ada didalamnya, para anggota berada dalam 8 fraksi yang mengusung para anggota menduduki jabatan sebagai wakil rakyat tersebut. Diantaranya adalah Fraksi Nasional Demokrat, Fraksi Harkat (Hanura-Demokrat), Fraksi partai Golkar, Fraksi partai Gerindra, Fraksi PKB, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Amanat Pembangunan (PAN-PPP)

4.1.2 Deskripsi Responden

Responden dalam penelitian ini dipilih menggunakan metode *purposive sampling* berdasarkan kriteria yang ditentukan sebelumnya hingga diperoleh sejumlah data yang siap diolah. Kuesioner disebar sejumlah 45 eksemplar sesuai dengan jumlah sampel yang mengambil semua populasi sebagai sampel penelitiannya. Tingkat pengembalian kuesioner dari responden sejumlah 43 eksemplar (95,6%). Namun dari 43 eksemplar kuesioner yang kembali terdapat 3 kuesioner yang dieliminasi disebabkan data yang diperoleh tidak bisa diolah karena pengisian jawaban yang kurang lengkap. Hingga diperoleh 40 eksemplar kuesioner yang dapat diolah. Berikut tabel Deskripsi kuesioner yang diperoleh :

Tabel 4.1 Deskriptif Kuesioner

Kuesioner Yang Disebar	45
Kuesioner Yang Kembali	43
Prosentase Tingkat Pengembalian	95,6%
Kuesioner Yang Tidak Dapat Diolah (tidak lengkap)	3
Kuesioner Yang Dapat Diolah	40
Prosentase Data Diolah	88,9%

4.1.3 Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah seluruh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember yang masuk dalam kriteria yang telah ditentukan di awal yang berjumlah 43 responden. Karakteristik responden dalam penelitian ini, yaitu karakteristik responden berdasarkan usia, jenis kelamin, dan pendidikan.

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia responden terbagi dalam 3 kelompok dari 40 responden, yaitu 30 – 35 tahun, 36 – 40 tahun, dan diatas 41 tahun. Berdasarkan penelitian yang telah

dilakukan, didapati karakteristik responden berdasarkan usia dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.2. Berikut data responden berdasarkan usia :

Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	
	Jumlah	Persentase
30 – 35 tahun	8	20%
36 – 40 tahun	22	55%
dias 41 tahun	10	25%
Jumlah	40	100%

Sumber : Data diolah, Januari 2015

Berdasarkan Tabel 4.2, dapat diketahui bahwa responden yang paling banyak atau mayoritas yang menjadi anggota DPRD Kabupaten Jember adalah responden yang berumur diantara 36 – 40 tahun, sedangkan minoritas responden yang menjadi anggota DPRD Kabupaten Jember adalah responden yang berumur diantara 30 – 35 tahun dan diatas 41 tahun.

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin responden terbagi dalam 2 kelompok dari 40 responden, yaitu laki-laki dan perempuan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapati karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.3. Berikut data responden berdasarkan jenis kelamin :

Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	
	Jumlah	Persentase
Perempuan	7	17,5%
Laki-laki	33	82,5%
Jumlah	40	100%

Sumber : Data diolah, Januari 2015

Berdasarkan Tabel 4.3, dapat diketahui bahwa responden yang paling banyak atau mayoritas yang menjadi anggota DPRD Kabupaten Jember adalah responden yang berjenis kelamin laki - laki, dan minoritas responden yang

menjadi anggota DPRD Kabupaten Jember adalah responden yang berjenis kelamin perempuan.

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan responden terbagi dalam 3 kelompok dari 40 responden, yaitu, SMA, Diploma, Strata 1 dan Strata 2. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapati karakteristik responden berdasarkan pendidikan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.4. Berikut data responden berdasarkan pendidikan ;

Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah	
	Jumlah	Persentase
SMA	10	25%
Diploma	3	7,5%
Strata 1	25	62,5%
Strata 2	2	5%
Jumlah	40	100%

Sumber : Data diolah, Januari 2015

Berdasarkan Tabel 4.4, dapat diketahui bahwa responden yang paling banyak atau mayoritas responden yang menjadi anggota DPRD Kabupaten Jember adalah responden telah berpendidikan Strata 1, sedangkan minoritas responden yang menjadi anggota DPRD Kabupaten Jember adalah responden telah berpendidikan SMA, Diploma dan Strata 2.

4.1.4 Analisis Deskriptif Statistik

Analisis deskriptif statistik adalah menggambarkan tentang ringkasan data-data penelitian seperti mean, standar deviasi, varian, modus, dll. Analisis deskriptif ini dapat digunakan untuk memberikan penjelasan dalam penelitian lanjutan untuk memberikan hasil yang lebih baik terhadap analisis regresi. Analisis deskriptif bersifat penjelasan statistik dengan memberikan gambaran data tentang jumlah

data, minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi (Prayitno, 2010:12). Adapun hasil uji Analisis Deskriptif Statistik ;

Tabel 4.5 Hasil Analisis Deskriptif Statistik

Keterangan	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Persepsi Transparansi (X ₁)	40	3,67	4,67	4,208	0,28
Persepsi Akuntabilitas (X ₂)	40	3,67	4,67	4,158	0,29
Kinerja Pemerintah (Y)	40	4	4,67	4,217	0,23
<i>Valid N (listwise)</i>	40				

Sumber : Lampiran 5

Berdasarkan tabel 4.5, berkaitan dengan analisis deskriptif statistik dapat dilihat bahwa dengan jumlah data sebanyak 40, variabel kinerja pemerintah (Y) mempunyai rata-rata sebesar 4,217, dengan nilai minimal 4 dan maksimal 4,67, sedangkan standar devisiasinya sebesar 23%. Variabel transparansi (X₁) mempunyai rata-rata 4,21, dengan nilai minimal 3,67 dan maksimal 4,67, sedangkan standar devisiasinya sebesar 28%. Variabel akuntabilitas (X₂) mempunyai rata-rata sebesar 4,16, dengan nilai minimal 3,67 dan maksimal 4,67, sedangkan standar devisiasinya sebesar 28%.

4.1.5 Uji Kualitas Data

4.1.5.1 Uji Validitas

Uji validitas dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur penelitian dalam melakukan fungsi ukurnya. Uji validitas sebagai alat ukur dalam penelitian ini, yaitu menggunakan korelasi *product moment pearson's*, yaitu dengan cara mengkorelasikan tiap pertanyaan dengan skor total, kemudian hasil korelasi tersebut dibandingkan dengan angka kritis taraf signifikan 5% (Prayitno, 2010:90). Berikut ini pada Tabel 4.6, adalah hasil pengujian validitas :

Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas

Indikator	<i>Product Moment Pearson's</i>	Sig.		A	Keterangan
X _{1.1.1}	0,760	0,000	<	0,05	Valid
X _{1.1.2}	0,760	0,000	<	0,05	Valid
X _{1.1.3}	0,649	0,000	<	0,05	Valid
X _{1.2.1}	0,533	0,000	<	0,05	Valid
X _{1.2.2}	0,494	0,001	<	0,05	Valid
X _{1.2.3}	0,697	0,000	<	0,05	Valid
X _{1.3.1}	0,853	0,000	<	0,05	Valid
X _{1.3.2}	0,798	0,000	<	0,05	Valid
X _{1.3.3}	0,635	0,009	<	0,05	Valid
X _{1.4.1}	0,481	0,002	<	0,05	Valid
X _{1.4.2}	0,707	0,000	<	0,05	Valid
X _{1.4.3}	0,478	0,002	<	0,05	Valid
X _{2.1.1}	0,703	0,000	<	0,05	Valid
X _{2.1.2}	0,634	0,000	<	0,05	Valid
X _{2.2.1}	0,457	0,003	<	0,05	Valid
X _{2.2.2}	0,502	0,001	<	0,05	Valid
X _{2.2.3}	0,477	0,002	<	0,05	Valid
X _{2.2.4}	0,471	0,002	<	0,05	Valid
X _{2.3.1}	0,793	0,000	<	0,05	Valid
X _{2.3.2}	0,686	0,000	<	0,05	Valid
X _{2.4.1}	0,645	0,000	<	0,05	Valid
X _{2.4.2}	0,756	0,000	<	0,05	Valid

Sumber : Lampiran 3

Lanjutan, Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas

Indikator	<i>Product Moment Pearson's</i>	Sig.		A	Keterangan
Y _{.1.1.1}	0,507	0,001	<	0,05	Valid
Y _{.1.1.2}	0,715	0,000	<	0,05	Valid
Y _{.1.1.3}	0,738	0,000	<	0,05	Valid
Y _{.1.1.4}	0,515	0,001	<	0,05	Valid
Y _{.1.1.5}	0,786	0,000	<	0,05	Valid
Y _{.1.1.6}	0,442	0,004	<	0,05	Valid
Y _{.1.2.1}	0,508	0,001	<	0,05	Valid
Y _{.1.2.3}	0,422	0,007	<	0,05	Valid
Y _{.1.2.4}	0,603	0,000	<	0,05	Valid
Y _{.1.3.1}	0,406	0,009	<	0,05	Valid
Y _{.1.3.2}	0,526	0,000	<	0,05	Valid
Y _{.1.3.3}	0,427	0,006	<	0,05	Valid
Y _{.1.3.4}	0,569	0,000	<	0,05	Valid
Y _{.1.3.5}	0,615	0,000	<	0,05	Valid
Y _{.1.4.1}	0,612	0,000	<	0,05	Valid
Y _{.1.4.2}	0,731	0,000	<	0,05	Valid
Y _{.1.4.3}	0,590	0,000	<	0,05	Valid
Y _{.1.4.4}	0,562	0,000	<	0,05	Valid
Y _{.1.5.1}	0,472	0,002	<	0,05	Valid
Y _{.1.5.2}	0,387	0,014	<	0,05	Valid
Y _{.1.5.3}	0,331	0,037	<	0,05	Valid
Y _{.1.5.4}	0,334	0,035	<	0,05	Valid
Y _{.1.5.5}	0,367	0,020	<	0,05	Valid
Y _{.1.5.6}	0,537	0,000	<	0,05	Valid
Y _{.1.5.7}	0,417	0,007	<	0,05	Valid
Y _{.1.5.8}	0,557	0,000	<	0,05	Valid
Y _{.1.5.9}	0,643	0,000	<	0,05	Valid
Y _{.1.5.10}	0,511	0,001	<	0,05	Valid
Y _{.1.6.1}	0,510	0,001	<	0,05	Valid
Y _{.1.6.2}	0,568	0,000	<	0,05	Valid
Y _{.1.6.3}	0,516	0,001	<	0,05	Valid

Sumber : Lampiran 3

Berdasarkan tabel 4.6, diketahui bahwa masing-masing indikator (item) dalam variabel yang digunakan mempunyai hasil nilai *product moment pearson's* dengan signifikansi $0,000 - 0,037 < 0,05$, sehingga indikator (item) yang digunakan dalam variabel penelitian ini dapat dinyatakan sesuai atau relevan dan dapat digunakan sebagai item dalam pengumpulan data.

4.1.5.2 Uji Reliabilitas

Pengujian ini dilakukan untuk menunjukkan sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten. Suatu pertanyaan atau pernyataan yang baik adalah pertanyaan atau pernyataan yang jelas mudah dipahami dan memiliki interpretasi yang sama meskipun disampaikan kepada responden yang berbeda dan waktu yang berlainan. Uji reliabilitas menggunakan *cronbach's alpha*. Suatu instrument dikatakan reliabel apabila *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,60 (Prayitno, 2010:97). Berikut pada Tabel 4.6 disajikan hasil pengujian reliabilitas ;

Tabel 4.7 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Cutt off</i>	<i>N of Item</i>	Keterangan
X ₁	0,724	> 0,6	12	Reliabel
X ₂	0,783	> 0,6	10	Reliabel
Y	0,826	> 0,6	32	Reliabel

Sumber : Lampiran 4

Berdasarkan Tabel 4.7, hasil uji reliabilitas diatas menunjukkan bahwa data yang diperoleh bersifat reliabel karena nilai *Cronbach's Alpha* yakni 0,724, 0,783, dan 0,826 > 0,60, sehingga data yang diperoleh dapat dinyatakan reliabel atau layak sebagai alat dalam pengumpulan data.

4.1.6 Analisis Data

4.1.6.1 Uji Asumsi Klasik

Setelah memperoleh model, maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah menguji apakah model yang dikembangkan bersifat BLUE (*Best Linier Unbised Estimator*) (Gujarati dalam Latan, 2013:14). Asumsi BLUE yang harus dipenuhi antara lain yaitu : data berdistribusi normal, tidak ada multikolinieritas, dan tidak adanya heteroskedastisitas. Pengujian asumsi klasik dilakukan pada model regresi linear berganda yang dijelaskan sebagai berikut ;

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang dilakukan terhadap sampel dilakukan dengan menggunakan *kolmogorov-smirnov test* dengan menetapkan derajat keyakinan (α) sebesar 5% (Prayitno, 2010:71). Adapun hasil pengujian dapat disajikan sebagai berikut ;

Tabel 4.8 Hasil Uji Normalitas

<i>Test of Normality</i>	<i>Kolmogorov-Smirnov</i>			Keterangan
	Sig.		<i>Cutt off</i>	
Persepsi Transparansi (X_1)	0,162	>	0,05	Normal
Persepsi Akuntabilitas (X_2)	0,124	>	0,05	Normal
Kinerja Pemerintah (Y)	0,197	>	0,05	Normal

Sumber : Lampiran 5

Berdasarkan tabel 4.8, dapat diketahui bahwa nilai probabilitas atau signifikansi untuk masing-masing variabel lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dinyatakan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Asumsi multikolinieritas adalah keadaan dimana terjadi hubungan linier yang sempurna atau mendekati sempurna antar variabel independen dalam model. Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear dalam variabel independen dalam model. Ada atau tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Latan (2013:61), menyatakan bahwa indikasi multikolinieritas pada umumnya terjadi jika VIF lebih dari 10, maka variabel tersebut mempunyai persoalan multikolinieritas dengan variabel bebas lainnya. Berikut ini disajikan hasil uji multikolinieritas ;

Tabel 4.9 Uji Multikolinearitas

<i>Test of Multikolinierity</i>	VIF		<i>Cutt off</i>	Keterangan
Persepsi Transparansi (X ₁)	1,178	<	10	Tidak terjadi multikolinieritas
Persepsi Akuntabilitas (X ₂)	1,178	<	10	Tidak terjadi multikolinieritas

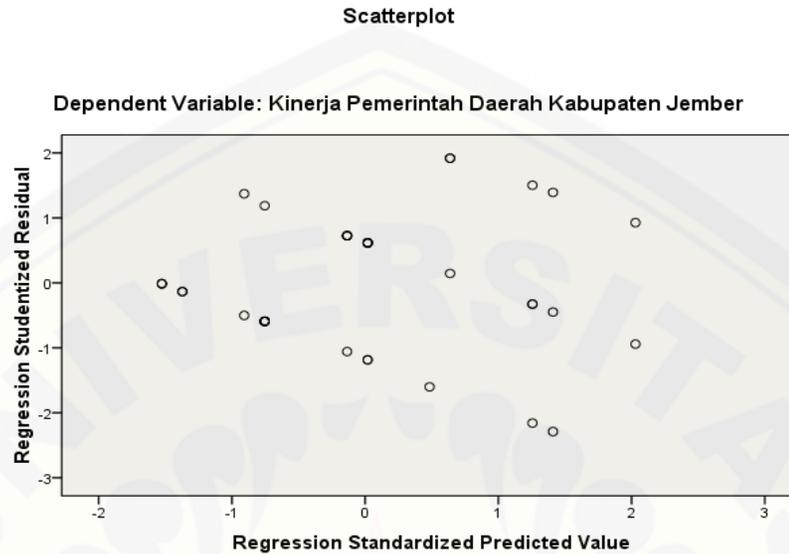
Sumber : Lampiran 6

Tabel 4.9, menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel *independen* karena menunjukkan nilai VIF kurang dari 10.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dari pola gambar scatterplot model tersebut (Latan, 2013:39). Dasar pengambilan keputusan antara lain :

- 1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik (point-point) yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka telah terjadi heteroskedastisitas;
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. hasil pengujian disajikan pada Gambar 4.1, sebagai berikut ;



Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Gambar 4.1, menunjukkan bahwa tidak adanya heteroskedastisitas, karena tebaran data tidak membentuk garis tertentu atau tidak terdapat pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y.

4.1.6.2 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi berganda berkaitan dengan studi ketergantungan suatu variabel *dependen* pada satu atau lebih variabel *independen* dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel *independen* terhadap variabel *dependen*. Hasil analisis regresi linear berganda antara variabel *independen* yaitu persepsi transparansi, dan akuntabilitas, serta variabel *dependen* yaitu kinerja. Berikut pada Tabel 4.9 disajikan hasil analisis regresi linear berganda ;

Tabel 4.10 Hasil Regresi Linear Berganda

Variabel <i>Independent</i>	<i>Unstandardized</i> <i>Coefficients B</i>	t	t _{tabel}	Sig.	<i>a</i>	Keterangan
(Constant)	1,768	-	-	-	-	-
Persepsi Transparansi (X ₁)	0,260	2,188	> 2,026	0,035	< 0,05	Signifikan
Persepsi Akuntabilitas (X ₂)	0,325	2,860	> 2,026	0,007	< 0,05	Signifikan
<i>Adjusted R Square</i> = 0,328				F. Hitung = 10,501 Sig. F = 0,000		

Sumber : Lampiran 5

Berdasarkan koefisien regresi, maka persamaan regresi yang dapat dibentuk adalah ;

$$Y = 1,768 + 0,260X_1 + 0,325X_2$$

- Nilai koefisien pada variabel transparansi, menunjukkan nilai positif yang berarti bahwa setiap kenaikan transparansi keuangan daerah, maka hal tersebut akan meningkatkan pula kinerja pemerintah daerah, dan sebaliknya;
- Nilai koefisien pada variabel akuntabilitas, menunjukkan nilai positif yang berarti bahwa setiap kenaikan akuntabilitas keuangan daerah, maka hal tersebut akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah, dan sebaliknya.

4.1.6.3 Uji Hipotesis

a. Uji F

Uji F dimaksudkan untuk menguji model variabel *independen* transparansi, dan akuntabilitas, terhadap variabel *dependen* yaitu kinerja pemerintah. Tabel distribusi F dicari pada $\alpha = 5\%$, dengan derajat kebebasan (df) df1 atau $3-1 = 2$, dan df2 $n-k-1$ atau $40-2-1 = 37$. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda diperoleh hasil, yaitu bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($10,501 > 3,25$) dan signifikansi ($0,000 < 0,05$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya variabel transparansi, dan

akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember.

b. Koefisien Determinasi (R^2)

Berfungsi untuk mengetahui besarnya proporsi atau sumbangan pengaruh variabel *independen* terhadap variabel *dependen* secara keseluruhan, maka dapat ditentukan dengan uji koefisien determinasi berganda (R^2). Dilihat dari nilai koefisien determinasi berganda, hasil analisis menunjukkan bahwa besarnya persentase sumbangan pengaruh variabel transparansi, dan akuntabilitas, terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, dapat dilihat dari nilai *Adjusted R Square* (R^2) menunjukkan sebesar 0,328 atau 32,8% dan sisanya 67,2% dipengaruhi atau dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini, seperti kemampuan kerja aparatur, dan rancangan kerja.

c. Uji t

1. Hasil uji t untuk hipotesis pertama menunjukkan bahwa H_1 diterima dan H_0 ditolak, ini ditunjukkan oleh variabel transparansi (X_1) memiliki nilai t 2,188 > 2,026 dan signifikansi $0,035 < 0,05$, yang berarti secara parsial variabel transparansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember. Hasil t_{hitung} positif, maka jika ada peningkatan pada variabel transparansi maka akan meningkatkan pula kinerja pemerintah;
2. Hasil uji t untuk hipotesis kedua menunjukkan bahwa H_2 diterima dan H_0 ditolak, ini ditunjukkan oleh variabel akuntabilitas (X_2) memiliki nilai t 2,860 > 2,0126 dan signifikansi $0,007 < 0,05$, yang berarti secara parsial variabel akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember. Hasil t_{hitung} positif, maka jika ada peningkatan pada variabel akuntabilitas maka akan meningkatkan pula kinerja pemerintah.

4.2 Pembahasan

Hasil pengujian koefisien dari analisis regresi linear berganda, menunjukkan bahwa transparansi, dan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dengan arah positif. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan, “ada pengaruh transparansi, dan akuntabilitas terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember” adalah diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa jika transparansi, dan akuntabilitas, memiliki nilai positif, maka akan memberikan pengaruh dalam meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember. Sebaliknya, jika memiliki nilai negatif maka akan memberikan pengaruh dalam menurunkan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember.

4.2.1 Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja

Transparansi Berpengaruh Terhadap Kinerja. Hasil uji t untuk hipotesis pertama menunjukkan bahwa H_1 diterima dan H_0 ditolak, ini ditunjukkan oleh variabel transparansi (X_1) memiliki nilai $t_{2,188} > 2,026$ dan signifikansi $0,035 < 0,05$, yang berarti secara parsial variabel transparansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember. Hasil menunjukkan t_{hitung} positif, maka jika terapat peningkatan pada variabel transparansi maka akan terjadi peningkatan pula terhadap kinerja pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang sudah dilakukan bahwa hak publik untuk mendapat pengumuman oleh pemerintah terkait kebijakan publik sudah diikuti oleh efektifitas media yang digunakan. Pemberian informasi kepada publik yang dirasa telah dapat meningkatkan kebijakan transparansi anggaran, telah menjadikan kinerja pemerintah atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dapat dikontrol dan diketahui oleh publik karena kemudahan dalam mendapatkan informasi merupakan bentuk transparansi atau keterbukaan yang telah dibuat oleh pemerintah.

Sama halnya dengan Hak Masyarakat Terhadap Akses Informasi” para responden setuju dengan pernyataan yang menyatakan bahwa publik juga dapat mengakses dokumen publik tentang anggaran sewaktu-waktu. Searah dengan itu, para responden juga menolak jika publik kesulitan dalam mengakses dokumen pemerintah daerah mengenai anggaran. Tentunya ini akan mempermudah masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah sehingga kinerja pemerintah daerah menjadi semakin lebih baik karena pengawasan oleh masyarakat yang semakin ketat.

Berbeda dengan pengukuran mengenai ketepatan dalam pelaporan. Dapat disimpulkan bahwa pelaporan yang disajikan oleh pemerintah sudah tepat waktu meskipun masih ada jarak dengan ketentuan waktu yang ditetapkan. Namun, meskipun sudah dirasa tepat waktu, laporan yang disajikan masih kurang tepat guna. Dalam artian, responden masih belum yakin bahwa laporan yang disajikan oleh pemerintah sudah dipergunakan secara tepat oleh masyarakat luas. Dengan artian bahwa laporan yang sudah disajikan oleh pemerintah, masih belum bisa ditelaah dan di eksplorasi oleh masyarakat secara umum dalam memberikan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah. Sehingga kurangnya pengawasan dari masyarakat berpotensi menurunkan kinerja pemerintah daerah itu sendiri.

Terakhir dalam pengukuran transparansi DPRD tentang keuangan daerah ini menyinggung mengenai “Kualitas Informasi Yang Disampaikan” menunjukkan bahwa hasil pelaporan yang disajikan oleh pemerintah daerah dengan tepat tertuju kepada masyarakat (*stakeholders*). Dengan demikian informasi mengenai berbagai macam anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah, alokasi dana yang akan digunakan oleh pemerintah dapat terpantau dan dinilai serta dievaluasi penggunaannya oleh masyarakat sehingga transparansi yang ada sangatlah mendukung untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa nilai koefisien variabel transparansi sebesar 0,260 atau 26% dengan arah positif. Dari hasil yang diperoleh, transparansi sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi

setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai atau keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat adalah baik. Hasil ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lismawati (2013), dimana pada penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa penerapan transparansi menunjukkan hasil yang berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap kinerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah di Provinsi Bengkulu, didukung pula dengan penelitian Rohmah (2012) yang menyimpulkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap kinerja partai politik.

4.2.2 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja

Hasil uji t untuk hipotesis kedua menunjukkan bahwa H_2 diterima dan H_0 ditolak, ini ditunjukkan oleh variabel akuntabilitas (X_2) memiliki nilai t 2,860 > 2,0126 dan signifikansi $0,007 < 0,05$, yang berarti secara parsial variabel akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember. Hasil tersebut menunjukkan t_{hitung} positif, maka jika ada peningkatan pada variabel akuntabilitas maka akan terjadi peningkatan pula terhadap kinerja pemerintah.

Akuntabilitas Berpengaruh Terhadap Kinerja diukur dari ada jaminan kepatuhan hukum dan tidak ada penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Jember. Dengan artian lainnya bahwa adanya akuntabilitas hukum dan kejujuran yang meliputi adanya kesesuaian jaminan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang diisyaratkan dalam peraturan daerah terkait penggunaan sumber dana publik, dan tidak adanya penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*) selama periode pemerintahan daerah, telah menjadikan kinerja pemerintah daerah semakin efektif karena ada kesadaran pribadi dari tiap-tiap individunya dalam mengemban amanah yang sudah diberikan kepadanya.

Prosedur sistem informasi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi sudah cukup baik. Dengan didukung prosedur sistem informasi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi yang sudah baik. Tentunya mampu mempermudah kinerja dari pemerintah daerah sendiri ini berpengaruh terhadap efektifitas waktu yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam merealisasikan tujuan yang semula sudah direncanakan.

Indikator selanjutnya yakni “Akuntabilitas Program” menunjukkan bahwa tujuan yang telah dari awal direncanakan terlaksanakan dengan baik serta adanya pertimbangan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya seminimal mungkin yang memungkinkan tercipta efisiensi anggaran. Ini membuktikan bahwa kinerja pemerintah telah terarah dan sesuai dengan program kerja yang telah direncanakan serta tetap mempertimbangkan cara yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Adanya pertanggungjawaban yang diambil oleh pemerintah daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat maupun terhadap masyarakat luas. Ini juga telah menjadikan kinerja pemerintah sesuai dengan penetapan kinerja yang telah disusun dengan anggaran yang telah disetujui bersama sehingga pencapaian outcome dari kinerja pemerintah dapat ditetapkan dan diawasi dengan target yang terkontrol dan lebih maksimal dalam pengelolaan dan pemanfaatan anggaran yang ada untuk kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan bersama.

Penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa nilai koefisien variabel akuntabilitas sebesar 0,325 atau 32,5% dengan arah positif. Akuntabilitas sebagai sebuah prinsip dari konsep *good corporate governance*, yaitu sebuah konsep tata kelola pemerintahan baru yang diadopsi oleh berbagai Negara berkembang dan merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban terhadap pemangku kepentingan lainnya berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku adalah baik, dengan artian lainnya bahwa adanya akuntabilitas hukum dan kejujuran yang meliputi adanya kesesuaian jaminan kepatuhan terhadap hukum

dan peraturan yang diisyaratkan dalam peraturan daerah terkait penggunaan sumber dana publik, dan tidak adanya penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*) selama periode pemerintahan daerah, telah menjadikan penetapan kinerja pemerintahan dapat dilaksanakan secara sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan bersama. Hasil ini didukung dan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Meidawati (2012) dimana pada penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas publik berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap kinerja SKPD di kabupaten Situbondo. Hasil ini juga didukung dengan penelitian Hartanti (2011) yang mengimpulkan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah.

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ;

- a. Transparansi laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten Jember dengan arah positif;
- b. Akuntabilitas keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten Jember dengan arah positif.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan kesimpulan yang telah dilakukan pada penelitian ini, didapati keterbatasan mengenai penelitian ini, adalah sebagai berikut :

- a. Penelitian hanya dikhususkan hanya kepada beberapa point dalam menilai kinerja pemerintah daerah yakni transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan masih banyak unsur lain yang dipakai dalam pengukuran kinerja baik dalam lingkup internal maupun eksternal;
- b. Penelitian ini menggunakan kuesioner dalam pengumpulan data, maka dibutuhkan kejujuran responden dalam menjawab poin-poin pertanyaan kuesioner tersebut. Apabila kemungkinan ada responden yang tidak menjawab dengan serius atau tidak jujur atau karena faktor kesibukan pekerjaan maka hal tersebut diluar kendali peneliti.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka dapat disarankan sebagai berikut ;

- a. Peneliti dalam penelitian selanjutnya yang sejenis dapat menambahkan unsur lain yang lebih kompleks baik dalam lingkup internal maupun eksternal dalam penelitiannya dalam menganalisa kinerja pemerintahan daerah. Seperti indikator-indikator ekonomi dan sosial secara komprehensif yang mencakup diantaranya keadaan ekonomi nasional, lingkungan bisnis, stabilitas dan pengembangan, kesehatan dan pendidikan.
- b. Peneliti dalam penelitian selanjutnya yang sejenis bisa menambahkan beberapa objek baru yang bisa dijadikan responden dalam penilaian kinerja pemerintah daerah seperti Lembaga swadaya masyarakat, organisasi massa, dll.
- c. Bagi Eksekutif (Pemerintah Kabupaten) agar lebih meningkatkan pelayanan publik terlebih di sektor pendidikan, kesehatan serta pelayanan publik lain yang memberikan kesan positif terhadap kinerja pemerintahan kabupaten Jember.
- d. Bagi Legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) agar bisa lebih objektif, jujur dan bijak dalam menunaikan hak dan kewajibannya untuk menilai dan mengawasi kinerja pemerintah daerah guna tercapainya fungsi badan legislatif yang telah diatur oleh Undang-Undang yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

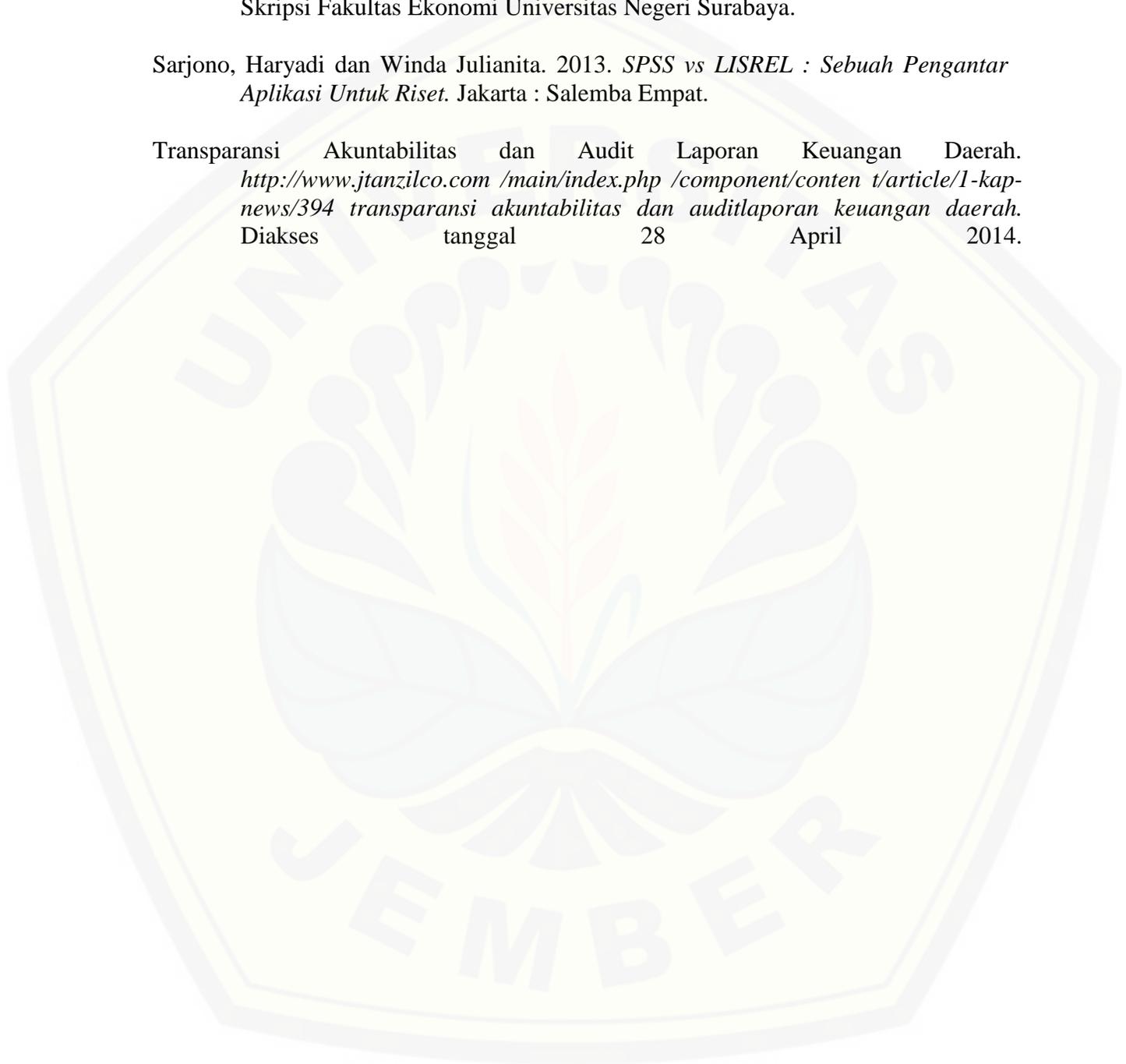
- Baroroh, Ali. 2013. *Analisis Multivariat & Time Series*. Jakarta : Gramedia.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*. Semarang : Universitas Diponegoro
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2013. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2013. *Akuntansi Sektor Publik : Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan. Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Harjanto, Wahjoe. 2014. *APBD Jember 2014 Capai Rp. 2,666 Triliun*. <http://surabaya.tribunnews.com/2013/11/04/apbd-jember-2014-capai-rp-2666-triliun>. Diakses pada 22 Juni 2015, 15:34 WIB.
- Hartanti, Karina. 2011. *Pandangan Publik Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah*. Semarang : Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Hartono, Jogyanto. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada.
- Haryatmoko, 2011, *Etika Publik Untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi*. PT Gramedia Pustaka Utama, Kompas Gramedia Building : Jakarta.
- Hasbi, Mohammad A.S, *Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Pemerintah Kabupaten Bantul* . Yogyakarta : Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2010. *Standar Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba, PSAK no.45. Kerangka konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010*.
- Kholmi, M. 2008. *Persepsi Mahasiswa Akuntansi terhadap Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Partai Politik*. *Ekonomika-Bisnis, Jurnal Penelitian dan Pemikiran*, Juni 01 (02): 215-226.
- Latan, Hengky. 2013. *Analisis Multivariat Teknik dan Aplikasi*. Bandung : Alfabeta

- Lismawati, Husaini dan Lucy Aditya. 2013. *Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*. Jurnal Fairness Volume 3, Nomor 1, 2013 : 21-41
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta
- Meidawati, Nurida. 2012. *Analisis Pengaruh Persepsi Penerapan Transaransi Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Jember. Jember.
- Nurlaila. 2010. *Manajemen Sumberdaya Manusia 1*. Jakarta : Penerbit LepKhair
- Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik dalam Rangka Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Partai Politik yang Transparan dan Akuntabel. <http://jdih.bpk.go.id/wpcontent/uploads/2013/04/tulisan-bantuan-parpol.pdf>. Diakses tanggal 28 April 2014.
- Penjelasan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 16 tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretarian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember.
- Penjelasan Atas UU Republik Indonesia No. 27 tahun 2009 Tentang MPR, DPR, dan DPRD.
- Penjelasan Atas UU Republik Indonesia No. 28 tahun 2009 tentang Total Pendapatan Daerah.
- Penjelasan Atas UU Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Penjelasan atas UU Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah.
- Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Total Pendapatan Daerah.
- Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Prayitno, Duwi. 2010. *Paham Analisa Data Statistik Dengan SPSS*. Yogyakarta : MediaKom.

Rohmah, Lailatur. 2012. *Persepsi Mahasiswa Akuntansi Unesa Tentang Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Partai Politik Terhadap Kinerja Partai dan Upaya Pemberantasan Kejahatan Kerah Putih*. Surabaya : Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya.

Sarjono, Haryadi dan Winda Julianita. 2013. *SPSS vs LISREL : Sebuah Pengantar Aplikasi Untuk Riset*. Jakarta : Salemba Empat.

Transparansi Akuntabilitas dan Audit Laporan Keuangan Daerah.
<http://www.jtanzilco.com/main/index.php/component/content/article/1-kap-news/394-transparansi-akuntabilitas-dan-audit-laporan-keuangan-daerah>.
Diakses tanggal 28 April 2014.



LAMPIRAN 1. KUESIONER PENELITIAN



Kuesioner Penelitian

**PENGARUH PERSEPSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TENTANG TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH
TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER**

Bapak / Ibu / Saudara yang terhormat

Dalam rangka penulisan tugas akhir sebagai mahasiswa S-1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember, saya selaku peneliti memohon dengan hormat kepada responden untuk meluangkan waktunya sejenak untuk mengisi kuesioner yang saya berikan sesuai dengan apa yang Bapak / Ibu / Saudara ketahui secara jujur dan terbuka

Data kuesioner ini saya perlukan untuk menyusun tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program studi S-1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember. Oleh karena itu, saya mengharapkan kesediaan Bapak / Ibu / Saudara untuk dapat mengisi kuesioner ini secara obyektif. Saya selaku peneliti menjamin kerahasiaan atas jawaban yang telah anda berikan dan semata-mata hanya saya gunakan untuk keperluan penelitian ini.

Atas kesediaan Bapak / Ibu / Saudara yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner ini saya ucapkan terima kasi

Hormat Saya

Rido Agung Gigih Krisherdian

NIM 100810301039

Kuesioner Penelitian

Identifikasi Responden

Nama :
Alamat :
Usia :
Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan *
Pendidikan Terakhir : SD / SMP / SMA / D3 / S1 / S2 **
Jabatan :

***Coret yang tidak perlu**

****Lingkari pilihan anda**

Petunjuk Pengisian

Pilihlah salah satu jawaban yang telah disediakan atas pertanyaan yang diajukan yang menurut anda paling mendukung / mendekati dengan jawaban pribadi anda dengan memberikan tanda lingkaran (O) kepada setiap jawaban di setiap butir pertanyaannya.

Contoh :

1.	Anda mengetahui bagaimana cara penyusunan APBD	<input checked="" type="radio"/> SS	<input type="radio"/> S	<input type="radio"/> TT	<input type="radio"/> TS	<input type="radio"/> STS
----	--	-------------------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------

Setiap butir pertanyaan disediakan jawaban dengan 5 kriteria penilaian, yakni :

SS : Sangat Setuju
S : Setuju
TT : Tidak Tahu
TS : Tidak Setuju
STS : Sangat Tidak Setuju

Transparansi

a. Komunikasi publik oleh pemerintah

No	PERTANYAAN	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)
1.	Sepengetahuan anda, publik mendapatkan pengumuman oleh pemerintah daerah terkait kebijakan publik	SS	S	TT	TS	STS
2.	Media yang digunakan oleh pemerintah dalam mempublikasikan informasi terkait kinerja Pemda sudah efektif	SS	S	TT	TS	STS
3.	Menurut anda, adanya sistem pemberian informasi kepada publik dapat meningkatkan kebijakan transparansi anggaran	SS	S	TT	TS	STS

b. Hak masyarakat terhadap akses informasi

No	PERTANYAAN	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)
1.	Sepengetahuan anda, publik merasa mudah mengakses dokumen publik tentang anggaran	SS	S	TT	TS	STS
2.	Sepengetahuan anda, sulit bagi publik untuk mengakses dokumen pemerintah daerah tentang anggaran dengan sistem birokrasi saat ini	STS	TS	TT	S	SS
3.	Sepengetahuan anda, publik bisa mengakses dokumen publik tentang anggaran sewaktu-waktu	SS	S	TT	TS	STS

c. Ketepatan dalam pelaporan

No	PERTANYAAN	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)
1.	Laporan pertanggung jawaban tahunan sepengetahuan anda selama ini tepat waktu	SS	S	TT	TS	STS
2.	Laporan pertanggung jawaban tahunan selama ini menurut anda kurang tepat waktu	STS	TS	TT	S	SS

3.	Laporan pertanggung jawaban tahunan sepengetahuan anda selama ini tepat guna (<i>stakeholders</i>)	SS	S	TT	TS	STS
----	--	----	---	----	----	-----

d. Kualitas informasi yang disampaikan.

No	PERTANYAAN	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)
1.	APBD disajikan secara terbuka kepada seluruh masyarakat.	SS	S	TT	TS	STS
2.	APBD disajikan secara cepat kepada seluruh masyarakat.	SS	S	TT	TS	STS
3.	APBD disajikan secara tepat kepada seluruh masyarakat.	SS	S	TT	TS	STS

Akuntabilitas

a. Akuntabilitas hukum dan kejujuran

No	PERTANYAAN	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)
1.	Adanya jaminan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang diisyaratkan dalam peraturan daerah terkait penggunaan sumber dana publik	SS	S	TT	TS	STS
2.	Tidak adanya penyalahgunaan jabatan (<i>abuse of power</i>) selama periode pemerintahan daerah	STS	TS	TT	S	SS

b. Akuntabilitas proses

No	PERTANYAAN	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)
1.	Prosedur sistem informasi yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik	SS	S	TT	TS	STS
2.	Prosedur sistem informasi manajemen yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik	SS	S	TT	TS	STS

3.	Prosedur administrasi yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik	SS	S	TT	TS	STS
4.	Proses manifestasi melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya	SS	S	TT	TS	STS

c. Akuntabilitas program

No	PERTANYAAN	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)
1.	Tujuan yang semula ditetapkan tercapai dengan baik	SS	S	TT	TS	STS
2.	Adanya pertimbangan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal	SS	S	TT	TS	STS

d. Akuntabilitas kebijakan.

No	PERTANYAAN	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)
1.	Adanya pertanggungjawaban atas kebijakan-kebijakan yang diambil terhadap DPRD setempat	SS	S	TT	TS	STS
2.	Adanya pertanggungjawaban atas kebijakan-kebijakan yang diambil terhadap masyarakat luas	SS	S	TT	TS	STS

Kinerja

a. Penetapan Kinerja

No	PERTANYAAN	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)
1.	Sepengetahuan anda, Pemerintah daerah menyusun suatu dokumen atau daftar penetapan kinerja	SS	S	TT	TS	STS
2.	Sepengetahuan anda, dokumen atau daftar penetapan kinerja tersebut telah disosialisasikan kepada tiap-tiap pegawai	SS	S	TT	TS	STS

3.	Dokumen atau daftar penetapan kinerja disusun segera setelah anggaran disetujui	SS	S	TT	TS	STS
4.	Penetapan kinerja sudah memuat indikator yang terukur	SS	S	TT	TS	STS
5.	Penetapan kinerja sudah dilengkapi dengan target kinerja	SS	S	TT	TS	STS
6.	Penetapan kinerja selaras dengan Rencana Kerja Tahunan	SS	S	TT	TS	STS

b. Pengukuran Kinerja

No	PERTANYAAN	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)
1.	Terdapat pengukuran atas indikator kinerja yang sudah ditetapkan	SS	S	TT	TS	STS
2.	Sepengetahuan anda, Pemerintah Daerah melakukan pencatatan pengumpulan kinerja secara berkala	SS	S	TT	TS	STS
3.	Sistem pengumpulan data kinerja dapat diandalkan	SS	S	TT	TS	STS
4.	Hasil pengumpulan kinerja telah dapat digunakan untuk menyusun laporan	SS	S	TT	TS	STS

c. Pencapaian Kerja (*Output*)

No	PERTANYAAN	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)
1.	Indikator kinerja output tepat	SS	S	TT	TS	STS
2.	Target <i>output</i> penting (<i>priority</i>) dapat dicapai	SS	S	TT	TS	STS
3.	Penetapan target (capaian) tepat	SS	S	TT	TS	STS
4.	Informasi mengenai kinerja <i>output</i> dapat diandalkan	SS	S	TT	TS	STS

5.	Kinerja output selaras dengan <i>outcome</i> yang ingin dicapai	SS	S	TT	TS	STS
----	---	----	---	----	----	-----

d. Pencapaian Kinerja (*Outcome*)

No	PERTANYAAN	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)
1.	Indikator kinerja <i>outcome</i> Pemerintah Daerah tepat	SS	S	TT	TS	STS
2.	Target <i>outcome</i> Pemerintah Daerah dapat dicapai	SS	S	TT	TS	STS
3.	Penetapan kinerja tepat dan dapat diukur	SS	S	TT	TS	STS
4.	Informasi kinerja <i>outcome</i> dapat diandalkan	SS	S	TT	TS	STS

e. Penyajian Informasi Kinerja

No	PERTANYAAN	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)
1.	LAKIP bukan merupakan kompilasi dari unit kerja	SS	S	TT	TS	STS
2.	LAKIP menyajikan informasi kinerja Pemerintah Daerah	SS	S	TT	TS	STS
3.	LAKIP menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja Pemerintah Daerah	SS	S	TT	TS	STS
4.	LAKIP telah berisikan penjelasan mengenai efektivitas pencapaian target Pemerintah Daerah	SS	S	TT	TS	STS
5.	Terdapat perbandingan data kerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan tahun sebelumnya	SS	S	TT	TS	STS
6.	Terdapat perbandingan data kerja yang memadai antara capaian tahun ini dengan tahun sebelumnya	SS	S	TT	TS	STS
7.	Terdapat perbandingan data kinerja yang memadai realisasi sampai dengan tahun ini dengan rencana sampai tahun ini	SS	S	TT	TS	STS

8.	Laporan Akuntabilitas Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja	SS	S	TT	TS	STS
9.	Terdapat mekanisme verifikasi data internal	SS	S	TT	TS	STS
10.	Laporan Akuntabilitas Kinerja disusun dari hasil pengukuran kinerja	SS	S	TT	TS	STS

f. Pemanfaatan Informasi Kinerja

No	PERTANYAAN	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)
1.	Sepengetahuan anda, informasi yang disajikan sudah digunakan dalam perbaikan perencanaan unit kerja di lingkup Pemerintah daerah	SS	S	TT	TS	STS
2.	Sepengetahuan anda, informasi yang disajikan sudah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kinerja Pemerintah Daerah	SS	S	TT	TS	STS
3.	Sepengetahuan anda, informasi yang disajikan sudah digunakan untuk peningkatan kinerja di lingkup Pemerintah Daerah	SS	S	TT	TS	STS

LAMPIRAN 2. HASIL REKAPITULASI JAWABAN RESPONDEN

NO	X.1.1.1	X.1.1.2	X.1.1.3	X.1.2.1	X.1.2.2	X.1.2.3	X.1.3.1	X.1.3.2
1	4	4	4	4	4	4	4	4
2	4	3	4	4	4	4	3	3
3	4	4	4	4	4	4	3	3
4	5	4	5	4	4	5	4	4
5	4	3	4	4	4	4	4	4
6	5	4	4	4	4	4	4	4
7	5	4	5	4	4	4	4	4
8	4	4	5	4	4	4	4	4
9	5	4	5	4	4	4	4	3
10	4	4	4	3	4	5	4	4
11	5	4	4	4	4	4	3	4
12	5	5	4	4	4	4	4	4
13	4	4	4	4	4	4	4	4
14	5	4	5	4	4	4	3	3
15	4	3	4	4	4	5	4	4
16	5	4	5	4	4	4	4	4
17	5	4	4	4	4	4	4	4
18	4	4	4	4	4	4	4	4
19	5	5	4	5	4	5	4	4
20	5	4	4	4	4	4	4	4
21	5	4	5	4	4	4	3	3
22	4	4	5	4	5	4	4	4
23	5	5	5	4	4	4	5	5
24	4	4	4	4	4	4	4	4
25	5	4	4	4	4	4	4	4
26	4	4	4	5	4	4	4	4
27	4	4	5	4	4	5	4	4
28	5	4	5	5	4	4	3	4
29	5	4	4	4	4	4	4	4
30	4	4	4	4	4	4	4	4
31	5	4	4	4	4	4	3	3
32	5	4	4	4	4	4	4	4
33	5	4	4	4	4	4	4	4
34	4	4	4	4	4	4	3	3
35	5	5	5	5	4	4	4	4
36	4	4	5	4	4	5	4	4
37	4	4	5	4	4	4	4	3
38	4	3	4	4	5	5	4	4
39	4	4	4	4	4	4	4	4
40	5	4	4	4	4	4	4	4

Digital Repository Universitas Jember

NO	X.1.3.3	X1.4.1	X.1.4.2	X.1.4.3	X.2.1.1	X.2.1.2	X.2.2.1	X.2.2.2
1	3	4	3	4	4	4	4	3
2	3	4	3	4	4	5	4	4
3	4	3	4	4	5	4	5	4
4	3	4	3	4	4	4	4	5
5	3	4	4	4	5	4	4	3
6	4	4	3	4	4	4	4	4
7	3	4	3	4	5	4	4	4
8	3	3	3	4	4	5	4	3
9	4	3	4	5	4	4	4	4
10	4	3	4	4	4	4	5	4
11	3	4	3	4	4	4	4	4
12	4	4	4	4	4	4	4	3
13	3	4	3	5	4	4	4	4
14	3	4	3	5	5	4	3	4
15	3	4	4	5	4	4	4	4
16	4	4	3	4	5	4	4	3
17	4	4	4	4	4	4	4	4
18	4	4	3	4	5	4	4	4
19	3	4	4	5	4	5	4	4
20	3	4	3	4	4	4	4	5
21	3	4	3	4	4	4	4	4
22	3	4	3	4	5	5	3	4
23	4	3	4	5	4	4	4	3
24	4	4	4	4	5	4	4	3
25	3	4	3	5	4	4	4	4
26	3	4	3	5	4	3	4	4
27	4	4	3	4	4	4	4	4
28	4	4	3	4	4	5	4	3
29	3	4	2	5	5	4	4	3
30	3	4	2	4	4	5	4	4
31	3	2	3	5	5	4	4	4
32	4	4	2	4	4	4	4	4
33	3	4	2	4	5	4	4	4
34	3	2	2	4	4	4	4	4
35	4	4	4	4	5	4	4	4
36	4	3	3	4	4	4	4	4
37	4	4	4	4	4	4	4	4
38	4	3	4	4	4	4	4	4
39	3	3	3	4	4	4	4	4
40	4	3	4	5	4	5	4	5

Digital Repository Universitas Jember

NO	X.2.2.3	X.2.2.4	X.2.3.1	X.2.3.2	X.2.4.1	X.2.4.2	Y.1.1.1	Y.1.1.2
1	4	4	4	4	4	4	4	4
2	4	4	3	4	4	4	4	3
3	3	4	4	3	3	4	5	4
4	4	3	3	4	4	4	5	3
5	4	4	4	4	4	3	4	4
6	5	4	4	4	4	4	4	4
7	4	3	4	4	5	4	4	4
8	3	4	4	4	4	4	4	3
9	4	3	5	4	4	5	4	4
10	4	4	3	4	4	4	5	4
11	3	4	4	4	4	4	4	4
12	4	5	4	3	3	4	4	3
13	4	4	4	4	4	4	4	3
14	4	3	5	4	4	4	5	4
15	4	3	4	4	4	3	4	4
16	4	4	5	4	4	4	5	4
17	3	4	4	4	4	4	4	3
18	3	4	4	3	5	4	4	4
19	4	3	4	4	4	4	5	4
20	3	4	3	4	4	4	4	3
21	4	3	4	4	4	5	4	4
22	3	4	4	4	4	4	5	4
23	4	3	4	4	3	4	3	4
24	4	4	5	4	4	4	4	4
25	5	4	4	3	4	4	3	3
26	4	4	4	4	4	4	4	4
27	4	4	4	5	4	4	4	4
28	4	3	5	5	4	3	4	3
29	4	4	4	3	4	4	4	4
30	4	4	4	5	4	4	4	4
31	4	4	4	5	4	4	4	4
32	4	4	4	4	4	4	4	3
33	4	4	5	4	4	3	4	4
34	4	3	5	4	4	4	3	3
35	4	4	4	4	4	4	4	4
36	4	4	4	4	4	4	4	4
37	5	4	3	4	4	4	4	3
38	4	4	4	4	4	3	3	4
39	4	4	4	4	4	4	4	4
40	4	4	5	4	4	4	5	4

Digital Repository Universitas Jember

NO	Y.1.1.3	Y.1.1.4	Y.1.1.5	Y.1.1.6	Y.1.2.1	Y.1.2.2	Y.1.2.3	Y.1.2.4
1	4	4	5	4	4	4	4	4
2	3	4	3	3	4	4	4	4
3	3	3	4	4	4	3	4	4
4	3	3	4	3	4	4	4	4
5	3	4	4	4	4	4	4	3
6	3	4	4	4	4	4	4	4
7	4	4	4	4	4	3	4	4
8	3	4	4	3	4	4	4	4
9	4	4	4	3	5	4	4	4
10	3	4	4	4	4	4	4	5
11	3	4	4	4	4	4	3	4
12	3	4	4	4	4	4	3	5
13	3	4	4	3	4	4	4	4
14	4	4	5	4	4	4	4	5
15	4	5	4	3	4	3	3	4
16	4	5	5	4	4	4	4	5
17	3	4	5	4	4	4	4	4
18	3	4	4	3	4	4	4	5
19	3	4	4	4	4	4	3	4
20	3	4	4	3	4	4	4	5
21	4	4	4	4	4	3	4	4
22	4	4	5	4	4	4	4	4
23	3	3	4	4	4	4	4	5
24	4	4	5	4	4	4	4	4
25	3	3	3	4	3	3	4	4
26	4	4	5	4	5	4	4	4
27	4	4	4	4	5	4	4	4
28	3	4	3	3	4	4	4	4
29	4	4	4	4	4	4	3	4
30	4	4	4	4	4	3	4	4
31	4	4	4	4	4	5	3	5
32	3	3	3	4	4	4	4	4
33	4	4	4	4	4	4	5	5
34	3	4	4	4	5	4	4	4
35	4	4	5	4	4	4	4	3
36	4	3	4	4	5	4	4	4
37	4	4	4	4	4	4	4	4
38	3	3	4	4	4	4	4	4
39	4	4	4	4	4	4	4	4
40	4	3	4	3	4	4	4	4

Digital Repository Universitas Jember

NO	Y.1.3.1	Y.1.3.2	Y.1.3.3	Y.1.3.4	Y.1.3.5	Y.1.4.1	Y.1.4.2	Y.1.4.3
1	4	4	4	4	4	4	4	4
2	4	4	4	4	4	4	4	3
3	4	4	5	4	4	4	4	4
4	4	4	3	4	4	3	3	4
5	3	4	4	4	4	4	3	4
6	4	4	4	4	4	4	4	3
7	4	4	5	4	4	4	4	4
8	4	4	4	5	4	3	3	3
9	4	4	4	4	4	4	4	4
10	4	4	3	4	4	4	3	4
11	4	3	4	4	4	4	4	4
12	4	4	4	4	3	4	5	4
13	4	4	4	4	4	3	3	4
14	5	4	4	4	5	4	4	4
15	4	4	4	4	4	3	4	4
16	4	4	3	4	4	4	4	3
17	4	4	4	4	4	4	4	3
18	4	4	4	4	4	4	3	4
19	3	4	4	4	4	4	4	4
20	4	4	4	4	4	4	4	4
21	4	4	4	4	4	4	3	4
22	4	5	4	4	4	3	4	4
23	4	5	4	5	5	5	5	4
24	4	5	4	4	3	3	4	4
25	4	4	4	4	3	3	4	3
26	4	4	5	4	4	4	4	3
27	4	4	4	4	4	3	4	4
28	4	4	4	3	3	4	5	5
29	4	5	4	4	4	4	4	4
30	4	4	4	4	4	4	4	4
31	4	3	4	4	4	5	5	4
32	4	5	4	4	4	4	4	4
33	4	4	4	4	4	4	4	4
34	4	4	4	3	4	4	4	4
35	4	4	4	4	4	4	4	4
36	5	4	4	4	4	4	3	3
37	4	4	3	4	4	4	4	4
38	4	4	4	4	4	3	4	3
39	4	3	4	4	4	4	4	4
40	4	4	4	4	3	4	3	4

Digital Repository Universitas Jember

NO	Y.1.4.4	Y.1.5.1	Y.1.5.2	Y.1.5.3	Y.1.5.4	Y.1.5.5	Y.1.5.6	Y.1.5.7
1	4	4	4	4	4	4	4	4
2	3	5	4	4	4	4	4	4
3	4	3	4	4	3	3	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	3
5	4	3	4	5	4	4	4	4
6	3	3	4	4	4	3	4	4
7	3	4	4	4	4	4	4	4
8	4	3	4	5	3	4	4	4
9	5	4	4	4	4	4	4	4
10	4	3	4	4	4	4	4	4
11	4	4	4	4	4	4	4	4
12	5	4	4	4	3	3	4	4
13	4	4	4	4	4	4	4	4
14	4	5	4	4	4	4	5	4
15	4	3	3	4	4	4	3	4
16	3	4	4	4	4	4	3	4
17	3	3	4	5	5	4	4	4
18	3	5	4	4	4	4	4	4
19	4	3	3	4	5	4	4	3
20	4	4	4	4	4	3	4	4
21	4	5	4	4	4	4	3	4
22	4	3	4	5	4	4	4	3
23	4	4	4	4	4	4	4	4
24	4	4	4	4	3	4	4	4
25	4	4	4	4	4	4	4	3
26	4	4	5	4	4	4	4	4
27	4	4	4	5	4	4	4	4
28	3	3	4	5	4	4	3	4
29	4	5	4	5	5	4	5	5
30	3	5	4	4	4	4	3	3
31	5	3	4	4	5	4	4	4
32	4	4	4	5	4	4	4	4
33	4	4	4	4	4	3	4	4
34	4	3	4	5	4	4	5	4
35	4	4	3	4	4	4	4	4
36	4	4	3	5	4	3	4	4
37	4	4	4	5	4	4	4	4
38	4	5	4	5	4	4	4	4
39	4	3	4	4	4	4	4	4
40	3	4	3	4	4	4	4	4

NO	Y.1.5.8	Y.1.5.9	Y.1.5.10	Y.1.6.1	Y.1.6.2	Y.1.6.3
1	4	4	4	4	4	4
2	3	3	4	4	4	4
3	4	3	3	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4
5	4	3	4	5	4	4
6	4	4	4	4	4	4
7	3	3	4	5	4	4
8	3	4	5	4	4	5
9	4	4	4	4	4	4
10	4	4	4	4	4	5
11	5	5	4	5	3	4
12	4	4	4	4	4	4
13	3	4	4	4	3	4
14	5	5	5	4	4	4
15	3	3	5	4	4	4
16	4	4	4	4	4	4
17	4	4	4	5	4	4
18	4	4	4	4	4	5
19	3	3	4	5	4	4
20	3	4	4	4	5	4
21	4	4	4	4	4	4
22	3	3	4	4	4	5
23	4	4	4	4	5	4
24	3	4	4	4	4	4
25	4	5	4	5	4	4
26	3	4	4	4	4	4
27	4	4	4	5	4	4
28	4	3	4	4	4	4
29	4	4	5	5	3	4
30	4	4	3	4	4	4
31	4	4	4	5	4	5
32	4	4	5	4	4	4
33	4	3	4	4	3	4
34	4	4	5	5	4	4
35	3	3	4	4	4	4
36	3	4	4	4	3	4
37	4	4	4	4	4	5
38	4	4	4	5	4	4
39	4	4	4	4	4	5
40	4	3	4	5	4	4

LAMPIRAN 3. HASIL UJI VALIDITAS

Correlations

		X.1.1.1	X.1.1.2	X.1.1.3	XT.1.1
X.1.1.1	Pearson Correlation	1	.448**	.173	.760**
	Sig. (2-tailed)		.004	.285	.000
	N	40	40	40	40
X.1.1.2	Pearson Correlation	.448**	1	.234	.760**
	Sig. (2-tailed)	.004		.145	.000
	N	40	40	40	40
X.1.1.3	Pearson Correlation	.173	.234	1	.649**
	Sig. (2-tailed)	.285	.145		.000
	N	40	40	40	40
XT.1.1	Pearson Correlation	.760**	.760**	.649**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	40	40	40	40

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		X.1.2.1	X.1.2.2	X.1.2.3	XT.1.2
X.1.2.1	Pearson Correlation	1	-.050	-.100	.533**
	Sig. (2-tailed)		.760	.539	.000
	N	40	40	40	40
X.1.2.2	Pearson Correlation	-.050	1	.196	.494**
	Sig. (2-tailed)	.760		.225	.001
	N	40	40	40	40
X.1.2.3	Pearson Correlation	-.100	.196	1	.697**
	Sig. (2-tailed)	.539	.225		.000
	N	40	40	40	40
XT.1.2	Pearson Correlation	.533**	.494**	.697**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.000	
	N	40	40	40	40

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		X1.3.1	X1.3.2	X1.3.3	XT.1.3
X1.3.1	Pearson Correlation	1	.743**	.245	.853**
	Sig. (2-tailed)		.000	.127	.000
	N	40	40	40	40
X1.3.2	Pearson Correlation	.743**	1	.131	.798**
	Sig. (2-tailed)	.000		.420	.000
	N	40	40	40	40
X1.3.3	Pearson Correlation	.245	.131	1	.635**
	Sig. (2-tailed)	.127	.420		.000
	N	40	40	40	40
XT.1.3	Pearson Correlation	.853**	.798**	.635**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	40	40	40	40

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		X1.4.1	X1.4.2	X1.4.3	XT.1.4
X1.4.1	Pearson Correlation	1	-.073	-.141	.481**
	Sig. (2-tailed)		.654	.385	.002
	N	40	40	40	40
X1.4.2	Pearson Correlation	-.073	1	.131	.707**
	Sig. (2-tailed)	.654		.420	.000
	N	40	40	40	40
X1.4.3	Pearson Correlation	-.141	.131	1	.478**
	Sig. (2-tailed)	.385	.420		.002
	N	40	40	40	40
XT.1.4	Pearson Correlation	.481**	.707**	.478**	1
	Sig. (2-tailed)	.002	.000	.002	
	N	40	40	40	40

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		X.2.1.1	X.2.1.2	XT.2.1
X.2.1.1	Pearson Correlation	1	-.104	.703**
	Sig. (2-tailed)		.525	.000
	N	40	40	40
X.2.1.2	Pearson Correlation	-.104	1	.634**
	Sig. (2-tailed)	.525		.000
	N	40	40	40
XT.2.1	Pearson Correlation	.703**	.634**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	
	N	40	40	40

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		X.2.2.1	X.2.2.2	X.2.2.3	X.2.2.4	XT.2.2
X.2.2.1	Pearson Correlation	1	.000	.000	.167	.457**
	Sig. (2-tailed)		1.000	1.000	.303	.003
	N	40	40	40	40	40
X.2.2.2	Pearson Correlation	.000	1	-.058	-.135	.502**
	Sig. (2-tailed)	1.000		.722	.405	.001
	N	40	40	40	40	40
X.2.2.3	Pearson Correlation	.000	-.058	1	-.097	.477**
	Sig. (2-tailed)	1.000	.722		.552	.002
	N	40	40	40	40	40
X.2.2.4	Pearson Correlation	.167	-.135	-.097	1	.471**
	Sig. (2-tailed)	.303	.405	.552		.002
	N	40	40	40	40	40
XT.2.2	Pearson Correlation	.457**	.502**	.477**	.471**	1
	Sig. (2-tailed)	.003	.001	.002	.002	
	N	40	40	40	40	40

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		X.2.3.1	X.2.3.2	XT.2.3
X.2.3.1	Pearson Correlation	1	.100	.793**
	Sig. (2-tailed)		.538	.000
	N	40	40	40
X.2.3.2	Pearson Correlation	.100	1	.686**
	Sig. (2-tailed)	.538		.000
	N	40	40	40
XT.2.3	Pearson Correlation	.793**	.686**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	
	N	40	40	40

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		X.2.4.1	X.2.4.2	XT.2.4
X.2.4.1	Pearson Correlation	1	-.013	.645**
	Sig. (2-tailed)		.937	.000
	N	40	40	40
X.2.4.2	Pearson Correlation	-.013	1	.756**
	Sig. (2-tailed)	.937		.000
	N	40	40	40
XT.2.4	Pearson Correlation	.645**	.756**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	
	N	40	40	40

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

	Y.1.1.1	Y.1.1.2	Y.1.1.3	Y.1.1.4	Y.1.1.5	Y.1.1.6	YT.1.1
Y.1.1.1 Pearson Correlation	1	.223	.186	.156	.310	-.107	.507**
Sig. (2-tailed)		.167	.251	.337	.051	.510	.001
N	40	40	40	40	40	40	40
Y.1.1.2 Pearson Correlation	.223	1	.546**	.137	.425**	.378*	.715**
Sig. (2-tailed)	.167		.000	.398	.006	.016	.000
N	40	40	40	40	40	40	40
Y.1.1.3 Pearson Correlation	.186	.546**	1	.314*	.464**	.231	.738**
Sig. (2-tailed)	.251	.000		.048	.003	.152	.000
N	40	40	40	40	40	40	40
Y.1.1.4 Pearson Correlation	.156	.137	.314*	1	.350*	-.061	.515**
Sig. (2-tailed)	.337	.398	.048		.027	.711	.001
N	40	40	40	40	40	40	40
Y.1.1.5 Pearson Correlation	.310	.425**	.464**	.350*	1	.322*	.786**
Sig. (2-tailed)	.051	.006	.003	.027		.043	.000
N	40	40	40	40	40	40	40
Y.1.1.6 Pearson Correlation	-.107	.378*	.231	-.061	.322*	1	.442**
Sig. (2-tailed)	.510	.016	.152	.711	.043		.004
N	40	40	40	40	40	40	40
YT.1.1 Pearson Correlation	.507**	.715**	.738**	.515**	.786**	.442**	1
Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000	.001	.000	.004	
N	40	40	40	40	40	40	40

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

	Y.1.2.1	Y.1.2.2	Y.1.2.3	Y.1.2.4	YT.1.2
Y.1.2.1 Pearson Correlation	1	.251	.084	-.095	.508**
Sig. (2-tailed)		.118	.608	.561	.001
N	40	40	40	40	40
Y.1.2.2 Pearson Correlation	.251	1	-.098	.238	.629**
Sig. (2-tailed)	.118		.547	.140	.000
N	40	40	40	40	40
Y.1.2.3 Pearson Correlation	.084	-.098	1	-.016	.422**
Sig. (2-tailed)	.608	.547		.923	.007
N	40	40	40	40	40
Y.1.2.4 Pearson Correlation	-.095	.238	-.016	1	.603**
Sig. (2-tailed)	.561	.140	.923		.000
N	40	40	40	40	40
YT.1.2 Pearson Correlation	.508**	.629**	.422**	.603**	1
Sig. (2-tailed)	.001	.000	.007	.000	
N	40	40	40	40	40

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

	Y.1.3.1	Y.1.3.2	Y.1.3.3	Y.1.3.4	Y.1.3.5	YT.1.3
Y.1.3.1 Pearson Correlation	1	.000	.000	.000	.192	.406**
Sig. (2-tailed)		1.000	1.000	1.000	.235	.009
N	40	40	40	40	40	40
Y.1.3.2 Pearson Correlation	.000	1	.007	.178	.021	.526**
Sig. (2-tailed)	1.000		.967	.272	.900	.000
N	40	40	40	40	40	40
Y.1.3.3 Pearson Correlation	.000	.007	1	.000	-.011	.427**
Sig. (2-tailed)	1.000	.967		1.000	.947	.006
N	40	40	40	40	40	40
Y.1.3.4 Pearson Correlation	.000	.178	.000	1	.384*	.569**
Sig. (2-tailed)	1.000	.272	1.000		.014	.000
N	40	40	40	40	40	40
Y.1.3.5 Pearson Correlation	.192	.021	-.011	.384*	1	.615**
Sig. (2-tailed)	.235	.900	.947	.014		.000
N	40	40	40	40	40	40
YT.1.3 Pearson Correlation	.406**	.526**	.427**	.569**	.615**	1
Sig. (2-tailed)	.009	.000	.006	.000	.000	
N	40	40	40	40	40	40

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

	Y.1.4.1	Y.1.4.2	Y.1.4.3	Y.1.4.4	YT.1.4
Y.1.4.1 Pearson Correlation	1	.375*	.177	-.005	.612**
Sig. (2-tailed)		.017	.276	.977	.000
N	40	40	40	40	40
Y.1.4.2 Pearson Correlation	.375*	1	.196	.192	.731**
Sig. (2-tailed)	.017		.225	.235	.000
N	40	40	40	40	40
Y.1.4.3 Pearson Correlation	.177	.196	1	.186	.590**
Sig. (2-tailed)	.276	.225		.249	.000
N	40	40	40	40	40
Y.1.4.4 Pearson Correlation	-.005	.192	.186	1	.562**
Sig. (2-tailed)	.977	.235	.249		.000
N	40	40	40	40	40
YT.1.4 Pearson Correlation	.612**	.731**	.590**	.562**	1
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
N	40	40	40	40	40

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Digital Repository Universitas Jember

Correlations

		Y.1.5.1	Y.1.5.2	Y.1.5.3	Y.1.5.4	Y.1.5.5	Y.1.5.6	Y.1.5.7	Y.1.5.8	Y.1.5.9	Y.1.5.10	YT.1.5
Y.1.5.1	Pearson Correlation	1	.135	-.174	.000	.111	.057	.135	.169	.312	-.033	.472**
	Sig. (2-tailed)		.405	.284	1.000	.494	.727	.405	.298	.050	.839	.002
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Y.1.5.2	Pearson Correlation	.135	1	.029	-.149	.075	.120	.107	.249	.384*	-.092	.387*
	Sig. (2-tailed)	.405		.858	.358	.646	.460	.511	.121	.014	.572	.014
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Y.1.5.3	Pearson Correlation	-.174	.029	1	.122	.122	.196	.175	.000	-.059	.350*	.331*
	Sig. (2-tailed)	.284	.858		.453	.452	.224	.280	1.000	.719	.027	.037
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Y.1.5.4	Pearson Correlation	.000	-.149	.122	1	.313*	.126	.000	.104	.000	.128	.334*
	Sig. (2-tailed)	1.000	.358	.453		.049	.439	1.000	.522	1.000	.430	.035
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Y.1.5.5	Pearson Correlation	.111	.075	.122	.313*	1	-.047	-.112	.065	.101	.257	.367*
	Sig. (2-tailed)	.494	.646	.452	.049		.772	.490	.689	.537	.109	.020
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Y.1.5.6	Pearson Correlation	.057	.120	.196	.126	-.047	1	.271	.157	.263	.413**	.537**
	Sig. (2-tailed)	.727	.460	.224	.439	.772		.091	.332	.101	.008	.000
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Y.1.5.7	Pearson Correlation	.135	.107	.175	.000	-.112	.271	1	.125	.024	.368*	.417**
	Sig. (2-tailed)	.405	.511	.280	1.000	.490	.091		.444	.883	.020	.007
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Y.1.5.8	Pearson Correlation	.169	.249	.000	.104	.065	.157	.125	1	.502**	.000	.557**
	Sig. (2-tailed)	.298	.121	1.000	.522	.689	.332	.444		.001	1.000	.000
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Y.1.5.9	Pearson Correlation	.312	.384*	-.059	.000	.101	.263	.024	.502**	1	.185	.643**
	Sig. (2-tailed)	.050	.014	.719	1.000	.537	.101	.883	.001		.252	.000
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Y.1.5.10	Pearson Correlation	-.033	-.092	.350*	.128	.257	.413**	.368*	.000	.185	1	.511**
	Sig. (2-tailed)	.839	.572	.027	.430	.109	.008	.020	1.000	.252		.001
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
YT.1.5	Pearson Correlation	.472**	.387*	.331*	.334*	.367*	.537**	.417**	.557**	.643**	.511**	1
	Sig. (2-tailed)	.002	.014	.037	.035	.020	.000	.007	.000	.000	.001	
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

		Y.1.6.1	Y.1.6.2	Y.1.6.3	YT.1.6
Y.1.6.1	Pearson Correlation	1	-.146	-.158	.510**
	Sig. (2-tailed)		.369	.330	.001
	N	40	40	40	40
Y.1.6.2	Pearson Correlation	-.146	1	.084	.568**
	Sig. (2-tailed)	.369		.607	.000
	N	40	40	40	40
Y.1.6.3	Pearson Correlation	-.158	.084	1	.516**
	Sig. (2-tailed)	.330	.607		.001
	N	40	40	40	40
YT.1.6	Pearson Correlation	.510**	.568**	.516**	1
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.001	
	N	40	40	40	40

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

LAMPIRAN 4. HASIL UJI RELIABILITAS

```
RELIABILITY
/VARIABLES=X.1.1.1 X.1.1.2 X.1.1.3 X.1.2.1 X.1.2.2 X.1.2.3 X.1.3.1 X.1.3.2
X.1.3.3 X1.4.1 X.1.4.2 X.1.4.3
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL

/MODEL=ALPHA.
```

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	40	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	40	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.724	12

```
RELIABILITY
/VARIABLES=X.2.1.1 X.2.1.2 X.2.2.1 X.2.2.2 X.2.2.3 X.2.2.4 X.2.3.1 X.2.3.2
X.2.4.1 X.2.4.2
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL

/MODEL=ALPHA.
```

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	40	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	40	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.783	10

```
RELIABILITY
```

```
/VARIABLES=Y.1.1.1 Y.1.1.2 Y.1.1.3 Y.1.1.4 Y.1.1.5 Y.1.1.6 Y.1.2.1 Y.1.2.2  
Y.1.2.3 Y.1.2.4 Y.1.3.1 Y.1.3.2 Y.1.3.3 Y.1.3.4 Y.1.3.5  
Y.1.4.1 Y.1.4.2 Y.1.4.3 Y.1.4.4 Y.1.5.1 Y.1.5.2 Y.1.5.3 Y.1.5.4 Y.1.5.5  
Y.1.5.6 Y.1.5.7 Y.1.5.8 Y.1.5.9 Y.1.5.10 Y.1.6.1  
Y.1.6.2 Y.1.6.3  
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL  
  
/MODEL=ALPHA.
```

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	40	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	40	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.826	32

LAMPIRAN 5. HASIL UJI NORMALITAS

NPAR TESTS

/K-S (NORMAL) =X.1 X.2 Y

/MISSING ANALYSIS.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Persepsi Transparansi Keuangan Daerah	Persepsi Akuntabilitas Keuangan Daerah	Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember
N		40	40	40
Normal Parameters ^a	Mean	4.2083	4.1583	4.2167
	Std. Deviation	.27927	.29223	.23327
Most Extreme Differences	Absolute	.172	.161	.143
	Positive	.146	.123	.128
	Negative	-.172	-.161	-.143
Kolmogorov-Smirnov Z		.988	1.129	.826
Asymp. Sig. (2-tailed)		.162	.124	.197

a. Test distribution is Normal.

LAMPIRAN 6. HASIL ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA

DESCRIPTIVES VARIABLES=X.1 X.2 Y

/STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Persepsi Transparansi Keuangan Daerah	40	3.67	4.67	4.2083	.27927
Persepsi Akuntabilitas Keuangan Daerah	40	3.67	4.67	4.1583	.29223
Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember	40	4.00	4.67	4.2167	.23327
Valid N (listwise)	40				

REGRESSION

/DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N
 /MISSING LISTWISE
 /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL
 /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
 /NOORIGIN
 /DEPENDENT Y
 /METHOD=ENTER X.1 X.2
 /SCATTERPLOT=(*SRESID , *ZPRED)

 /RESIDUALS NORM(ZRESID) .

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember	4.2167	.23327	40
Persepsi Transparansi Keuangan Daerah	4.2083	.27927	40
Persepsi Akuntabilitas Keuangan Daerah	4.1583	.29223	40

Correlations

		Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember	Persepsi Transparansi Keuangan Daerah	Persepsi Akuntabilitas Keuangan Daerah
Pearson Correlation	Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember	1.000	.470	.529
	Persepsi Transparansi Keuangan Daerah	.470	1.000	.388
	Persepsi Akuntabilitas Keuangan Daerah	.529	.388	1.000
Sig. (1-tailed)	Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember	.	.001	.000
	Persepsi Transparansi Keuangan Daerah	.001	.	.007
	Persepsi Akuntabilitas Keuangan Daerah	.000	.007	.
N	Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember	40	40	40
	Persepsi Transparansi Keuangan Daerah	40	40	40
	Persepsi Akuntabilitas Keuangan Daerah	40	40	40

Variables Entered/Removed^b

Mode	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Persepsi Akuntabilitas Keuangan Daerah, Persepsi Transparansi Keuangan Daerah ^a	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember

Model Summary^b

Mode	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.602 ^a	.362	.328	.19128

a. Predictors: (Constant), Persepsi Akuntabilitas Keuangan Daerah, Persepsi Transparansi Keuangan Daerah

b. Dependent Variable: Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.768	2	.384	10.501	.000 ^a
	Residual	1.354	37	.037		
	Total	2.122	39			

a. Predictors: (Constant), Persepsi Akuntabilitas Keuangan Daerah, Persepsi Transparansi Keuangan Daerah

b. Dependent Variable: Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.768	.540		3.274	.002		
	Persepsi Transparansi Keuangan Daerah	.260	.119	.312	2.188	.035	.849	1.178
	Persepsi Akuntabilitas Keuangan Daerah	.325	.114	.408	2.860	.007	.849	1.178

a. Dependent Variable: Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember

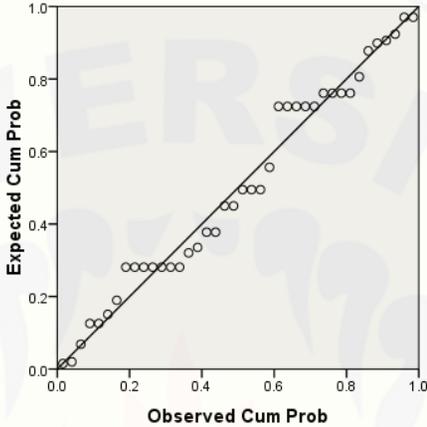
Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	4.0024	4.5014	4.2167	.14037	40
Std. Predicted Value	-1.526	2.029	.000	1.000	40
Standard Error of Predicted Value	.036	.071	.051	.012	40
Adjusted Predicted Value	4.0027	4.5267	4.2180	.14329	40
Residual	-.41461	.36050	.00000	.18631	40
Std. Residual	-2.168	1.885	.000	.974	40
Stud. Residual	-2.290	1.919	-.003	1.015	40
Deleted Residual	-.46281	.37381	-.00132	.20244	40
Stud. Deleted Residual	-2.438	1.995	-.005	1.040	40
Mahal. Distance	.413	4.331	1.950	1.342	40
Cook's Distance	.000	.203	.029	.046	40
Centered Leverage Value	.011	.111	.050	.034	40

a. Dependent Variable: Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember

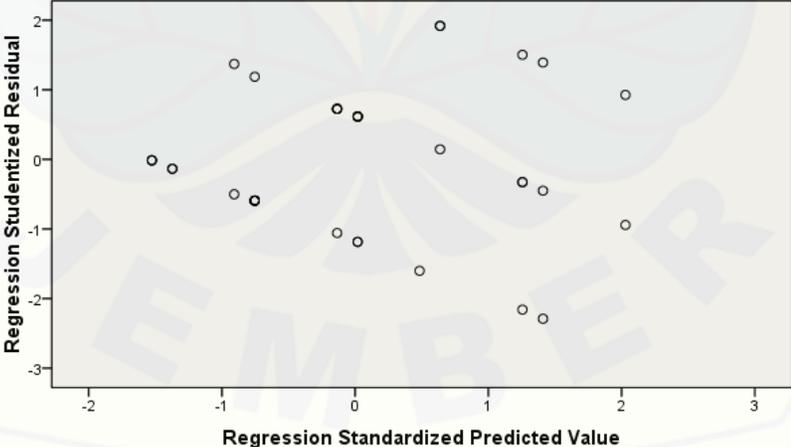
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember



Scatterplot

Dependent Variable: Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember



LAMPIRAN 7. TABEL t

Titik Persentase Distribusi t (df = 1 – 40)

Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
df	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
1	1.00000	3.07768	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	318.30884
2	0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.32712
3	0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453
4	0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318
5	0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343
6	0.71756	1.43976	1.94318	2.44691	3.14267	3.70743	5.20763
7	0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	4.78529
8	0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079
9	0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.29681
10	0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370
11	0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470
12	0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92963
13	0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85198
14	0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97684	3.78739
15	0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	3.73283
16	0.69013	1.33676	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	3.68615
17	0.68920	1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89823	3.64577
18	0.68836	1.33039	1.73406	2.10092	2.55238	2.87844	3.61048
19	0.68762	1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86093	3.57940
20	0.68695	1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.84534	3.55181
21	0.68635	1.32319	1.72074	2.07961	2.51765	2.83136	3.52715
22	0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81876	3.50499
23	0.68531	1.31946	1.71387	2.06866	2.49987	2.80734	3.48496
24	0.68485	1.31784	1.71088	2.06390	2.49216	2.79694	3.46678
25	0.68443	1.31635	1.70814	2.05954	2.48511	2.78744	3.45019
26	0.68404	1.31497	1.70562	2.05553	2.47863	2.77871	3.43500
27	0.68368	1.31370	1.70329	2.05183	2.47266	2.77068	3.42103
28	0.68335	1.31253	1.70113	2.04841	2.46714	2.76326	3.40816
29	0.68304	1.31143	1.69913	2.04523	2.46202	2.75639	3.39624
30	0.68276	1.31042	1.69726	2.04227	2.45726	2.75000	3.38518
31	0.68249	1.30946	1.69552	2.03951	2.45282	2.74404	3.37490
32	0.68223	1.30857	1.69389	2.03693	2.44868	2.73848	3.36531
33	0.68200	1.30774	1.69236	2.03452	2.44479	2.73328	3.35634
34	0.68177	1.30695	1.69092	2.03224	2.44115	2.72839	3.34793
35	0.68156	1.30621	1.68957	2.03011	2.43772	2.72381	3.34005
36	0.68137	1.30551	1.68830	2.02809	2.43449	2.71948	3.33262
37	0.68118	1.30485	1.68709	2.02619	2.43145	2.71541	3.32563
38	0.68100	1.30423	1.68595	2.02439	2.42857	2.71156	3.31903
39	0.68083	1.30364	1.68488	2.02269	2.42584	2.70791	3.31279
40	0.68067	1.30308	1.68385	2.02108	2.42326	2.70446	3.30688

LAMPIRAN 8. TABEL F

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilitas = 0,05

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	161	199	216	225	230	234	237	239	241	242	243	244	245	245	246
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.40	19.41	19.42	19.42	19.43
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.76	8.74	8.73	8.71	8.70
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.94	5.91	5.89	5.87	5.86
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.70	4.68	4.66	4.64	4.62
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.03	4.00	3.98	3.96	3.94
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.60	3.57	3.55	3.53	3.51
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.31	3.28	3.26	3.24	3.22
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.10	3.07	3.05	3.03	3.01
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.94	2.91	2.89	2.86	2.85
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.82	2.79	2.76	2.74	2.72
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.72	2.69	2.66	2.64	2.62
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.63	2.60	2.58	2.55	2.53
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.57	2.53	2.51	2.48	2.46
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.51	2.48	2.45	2.42	2.40
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.46	2.42	2.40	2.37	2.35
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.41	2.38	2.35	2.33	2.31
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.37	2.34	2.31	2.29	2.27
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.34	2.31	2.28	2.26	2.23
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.31	2.28	2.25	2.22	2.20
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.28	2.25	2.22	2.20	2.18
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.26	2.23	2.20	2.17	2.15
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27	2.24	2.20	2.18	2.15	2.13
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.22	2.18	2.15	2.13	2.11
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	2.20	2.16	2.14	2.11	2.09
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	2.18	2.15	2.12	2.09	2.07
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20	2.17	2.13	2.10	2.08	2.06
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19	2.15	2.12	2.09	2.06	2.04
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18	2.14	2.10	2.08	2.05	2.03
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.13	2.09	2.06	2.04	2.01
31	4.16	3.30	2.91	2.68	2.52	2.41	2.32	2.25	2.20	2.15	2.11	2.08	2.05	2.03	2.00
32	4.15	3.29	2.90	2.67	2.51	2.40	2.31	2.24	2.19	2.14	2.10	2.07	2.04	2.01	1.99
33	4.14	3.28	2.89	2.66	2.50	2.39	2.30	2.23	2.18	2.13	2.09	2.06	2.03	2.00	1.98
34	4.13	3.28	2.88	2.65	2.49	2.38	2.29	2.23	2.17	2.12	2.08	2.05	2.02	1.99	1.97
35	4.12	3.27	2.87	2.64	2.49	2.37	2.29	2.22	2.16	2.11	2.07	2.04	2.01	1.99	1.96
36	4.11	3.26	2.87	2.63	2.48	2.36	2.28	2.21	2.15	2.11	2.07	2.03	2.00	1.98	1.95
37	4.11	3.25	2.86	2.63	2.47	2.36	2.27	2.20	2.14	2.10	2.06	2.02	2.00	1.97	1.95
38	4.10	3.24	2.85	2.62	2.46	2.35	2.26	2.19	2.14	2.09	2.05	2.02	1.99	1.96	1.94
39	4.09	3.24	2.85	2.61	2.46	2.34	2.26	2.19	2.13	2.08	2.04	2.01	1.98	1.95	1.93
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08	2.04	2.00	1.97	1.95	1.92
41	4.08	3.23	2.83	2.60	2.44	2.33	2.24	2.17	2.12	2.07	2.03	2.00	1.97	1.94	1.92
42	4.07	3.22	2.83	2.59	2.44	2.32	2.24	2.17	2.11	2.06	2.03	1.99	1.96	1.94	1.91
43	4.07	3.21	2.82	2.59	2.43	2.32	2.23	2.16	2.11	2.06	2.02	1.99	1.96	1.93	1.91
44	4.06	3.21	2.82	2.58	2.43	2.31	2.23	2.16	2.10	2.05	2.01	1.98	1.95	1.92	1.90
45	4.06	3.20	2.81	2.58	2.42	2.31	2.22	2.15	2.10	2.05	2.01	1.97	1.94	1.92	1.89